Pact

Dialog Antara LSM - ABRI - Pemerintah

Menuju MASYARAKAT MADANI

AAN KPA
:1

Dirangkum dari hasil Seminar
"Pengembangan Peran Serta Masyarakat
dan Civil Society"
kerjasama INPI-Pact dan Lemhannas

INPI-Pact & Lemhannas
Jakarta 1998

PERPUS
1

Menuju Masyarakat Madani

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Cetakan Pertama, April 1998
Tata wajah: Adi Nugroho

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit

Diterbitkan oleh INPI-Pact bekerjasama dengan Lemhannas

ISBN: 979-95425-0-2

Dicetak oleh:
Percetakan PT. Penebar Swadaya, Jakarta

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

MENUJU MASYARAKAT MADANI

Dirangkum Dari Hasil Seminar Sehari
'Pengembangan Peran Serta Masyarakat
Dan "Civil Society"
kerjasama
Lemhannas dan INPI-Pact Indonesia

Lemhannas & INPI-Pact
Jakarta 1998

Executive Body
Komplek Pratista II, Blok F No. 125
Antapani, Bandung 40291
Phone/Fax: +62 - 22 - 7
E-mail:

N. 138
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Buku ini diterbitkan dalam rangka
Pelaksanaan Program INPI-Pact
Yang didukung oleh USAID

Penyunting:

Kastorius Sinaga
Imran Hasibuan
Meilani Dhamayanti

Daftar Isi

Halaman

1. Pengantar Gubernur Lemhannas
(Letjen TNI Sofian Effendi, Gubernur Lemhannas) i
2. Prakata Direktur INPI-Pact
(Dr.Kastorius Sinaga) iii
3. Civil Society Bagian dari Proses Demokratisasi :
Pokok-pokok pikiran pidato Wakil Gubernur Lemhannas
Keynote Speaker : Prof.Dr.Juwono Sudarsono vii

BAB I : Demokrasi, LSM dan Peran serta Masyarakat x
1. ABRI sebagai Kekuatan Politik dalam Kesinambungan Pembangunan
(Oleh Mayjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono) 1
2. Peningkatan Peran Serta Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat
(Oleh Dr. Manuwoto) 13
3. Diskusi Sessi I 25

BAB II : Pembinaan LSM **41**
1. Civil Society dan LSM
(Oleh Drs. Rustam Ibrahim) 43
2. Hubungan LSM Dengan Pemerintah
(Soetojo NK) 61
3. Hubungan ABRI dan LSM
(Oleh Jendral .Purn.Rudini) 75
4. Diskusi Sessi II 81

BAB III : Penutup dan Kesimpulan **87**

Lampiran
Daftar Peserta 89

KATA PENGANTAR GUBERNUR LEMHANNAS

Selaku Pimpinan Lemhannas saya menyambut baik prakarsa penerbitan hasil seminar sehari tentang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Civil Society, oleh INPI-Pact Indonesia ini. Di samping nilai dokumentatif terhadap berbagai pemikiran yang berkembang di dalam seminar penerbitan buku ini juga mencerminkan sikap kepedulian kita terhadap dinamika tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik yang berlingkup makro maupun mikro. Seminar yang diselenggarakan oleh INPI-Pact Indonesia bersama Lemhannas pada 22 September 1997, yang hasilnya terangkum dalam buku ini, telah membahas berbagai fenomena dan bahkan permasalahan secara cukup mendalam tentang Civil society, khususnya yang berkembang di Indonesia. Dari tinjauan Lemhannas berbagai bahasan tadi memang selalu dikaitkan dengan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan juga Kewaspadaan Nasional. Dengan demikian diharapkan implementasinya akan selalu mengandung nilai komprehensif-integral (utuh menyeluruh dan terpadu) serta terhindar dari kemungkinan munculnya berbagai kerawanan yang kadang justru bertentangan dengan hakekat Civil Society itu sendiri.

Berkaitan dengan upaya pengembangan Civil Society, khususnya tentang peran serta maysarakat, memang hal tersebut merupakan suatu proses yang memerlukan waktu baik dari fungsinya sebagai nilai preparatif, nilai protektif maupun nilai kontrol atau kendalinya, agar tetap mengarah pada tujuan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Untuk itu selalu diperlukan upaya pendalaman masalah, pemahaman latar belakang dan akar permasalahan, penciptaan peluang dan pengembangan alternatif, pertimbangan risiko yang haru diperhitungkan serta upaya untuk menghindari munculnya kondisi yang tidak diharapkan.

Berbagai bahasan yang terangkum dalam buku ini kiranya akan merupakan pelengkap terhadap pemikiran atau kajian yang pernah ada sebelumnya. Oleh karenanya saya berharap penerbitan buku ini akan membawa manfaat bagi upaya penciptaan dan pengembangan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin baik, melalui proses pembangunan nasional.

Jakarta, Maret 1998

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL



SOFIAN EFFENDI
LETNAN JENDERAL TNI

Prakata

Dalam arus pembangunan ekonomi yang ditandai dengan berbagai perubahan-perubahan mendasar di bidang sosial, budaya dan politik, partisipasi atau peran serta masyarakat menjadi salah satu pokok persoalan penting. Bahkan aspek ini seringkali dipandang sebagai kunci bagi kesinambungan Pembangunan. Hal ini terutama berkaitan dengan meningkatnya kompleksitas beban serta masalah pembangunan, yang pada prinsipnya tidak mungkin dapat diatasi hanya oleh pemerintah tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat.

Munculnya persoalan-persoalan mendasar di masyarakat seperti kemiskinan, kesenjangan serta gejala kerusuhan sosial belakangan ini, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung dapat dilihat sebagai implikasi dari kecenderungan penyempitan peran serta masyarakat dalam berbagai sub-sistem kemasyarakatan kita. Bahkan tidak jarang muncul pendapat bila paradigma globalisasi dengan sistem ekonomi yang terbuka dan kompetitif seperti yang sedang kita alami akan semakin mengandung potensi untuk membuat masyarakat, khususnya dari golongan lemah, semakin tersisih dari berbagai ekses ekonomi, sosial dan politik.

Masalah peningkatan peran serta masyarakat, pada prinsipnya tidak terlepas dari perlunya pengembangan kerangka makro yang kondusif. Secara struktural berarti peningkatan kualitas prasarana kelembagaan yang dapat mendorong proses pemberdayaan masyarakat di dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, secara konsepsional, pemberdayaan masyarakat lewat peningkatan peran serta masyarakat berlangsung dalam sebuah cita-cita pembentukan civil society yang demokratis di atas prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan hukum di bawah semangat Pancasila dan UUD 45.

Berbagai peristiwa politik akhir-akhir ini telah menunjukkan tanda-tanda yang nyata bahwa masyarakat secara kritis semakin menuntut

adanya perluasan partisipasi lewat peningkatan kualitas fungsi lembaga-lembaga penopang demokrasi. Lembaga-lembaga tersebut mencakup suprastruktur politik (seperti partai politik dan lembaga perwakilan rakyat) dan infrastruktur (pers, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat). Terdapat kesan, selama ini lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan, baik di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur politik, belum berfungsi secara optimal dan efektif karena terlalu mendapat intervensi dari pemerintah dalam berbagai bentuk.

Artinya, selama ini organisasi sosial dan politik tersebut hanya menjadi saluran politik pemerintah terhadap masyarakat, bukan sebaliknya: menjadi penyalur aspirasi kepentingan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga bersifat kondusif terhadap kepentingan masyarakat, sebagaimana layaknya konsep negara madani yang demokratis. Maka, tak mengherankan, munculnya LSM di hampir wilayah seluruh Indonesia yang memfokuskan diri pada berbagai isu aktual di masyarakat seperti masalah lingkungan, kemiskinan, hak-hak sipil dan politik, serta masalah demokratisasi, dapat dilihat sebagai bukti tersumbatnya aspirasi masyarakat serta keinginan dari masyarakat untuk semakin terlibat dalam penyelesaian berbagai masalah aktual yang muncul.

Perkembangan LSM di Indonesia cukup unik dan menarik, baik dari sudut kuantitas maupun kualitas. Pertama, terdapat pergeseran pada fokus kegiatan. Jika di tahun 1970-an terfokus pada masalah-masalah pengabdian bersifat sosial karitatif, kini menjadi sebuah gerakan yang memiliki agenda politik yang bersifat struktural dengan memakai isu-isu aktual seputar masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi sebagai entry point untuk mendesakkan perubahan-perubahan di bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kedua, cakupan kegiatan LSM juga berkembang, dari hanya beroperasi di tingkat lokal menjadi sebuah gerakan bersifat nasional yang memiliki jaringan kerja secara internasional. Ketiga, para pendukung dan konstituante LSM juga mengalami perkembangan, semula hanya berasal dari aktivis sosial, kemudian merambah hingga

kalangan intelektual, kelas menengah perkotaan, dan aktivis mahasiswa. Saat ini terdapat sekitar 8.700 LSM yang secara resmi terdaftar di administrasi pemerintahan, sebuah jumlah yang cukup besar, dan dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya di daerah-daerah.

Semakin berkembangnya LSM, baik jumlah maupun fokus kegiatannya, telah menimbulkan berbagai masalah baru antara kalangan LSM dengan pemerintah/ABRI. Disamping kerjasama, juga tidak jarang terjadi pergesekan, bahkan konflik di lapangan. Ini tentunya semakin membuat hubungan antara LSM dan pemerintah semakin krusial akhir-akhir ini. Bahkan banyak kasus-kasus menyolok, seperti Peristiwa 27 Juli, pemogokan buruh, demonstrasi aktivis mahasiswa serta advokasi di dalam dan di luar negeri, telah mengganggu hubungan dan komunikasi antara pemerintah dan ABRI— selaku aparat keamanan— dengan kalangan LSM. Situasi demikian bila dibiarkan terus berkembang akan semakin mengakibatkan ekses-ekses negatif, yang tentunya akan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu penyebab situasi di atas adalah kurangnya dialog yang dapat berfungsi sebagai ajang pertemuan pemikiran, pendapat dan harapan dari berbagai pihak. Disamping itu, situasi demikian juga terjadi sebagai akibat semakin renggangnya komunikasi yang dilandasi semangat keterbukaan antara LSM, pemerintah dan ABRI. Untuk itu dirasakan perlunya dialog yang melibatkan berbagai pihak. Dengan latar belakang pemikiran itulah, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bekerja sama dengan INPI Pact, menggelar seminar sehari bertemakan: 'Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Civil Society'.

Sebagai salah satu pusat pengkajian terhadap masalah-masalah yang menyangkut ketahanan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, Lemhannas memiliki relevansi dan kepentingan untuk melaksanakan dialog tersebut. Lewat program INPI (Indonesian NGOs Partnership Intiatives), yang salah satunya bertujuan mendukung proses peningkatan peran serta masyarakat lewat berbagai kegiatan pengkajian,

publikasi dan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan LSM, Pact, lembaga pembangunan yang berkantor pusat di Washington DC telah bekerjasama dengan Lemhannas dalam melaksanakan seminar tersebut di atas, pada tanggal 22 September 1997 yang lalu.

Hasil seminar ini diharapkan merupakan pengkajian secara objektif terhadap situasi sosial dan politik masyarakat aktual khususnya yang berkaitan dengan prospek dan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Selain itu, diharapkan di masa mendatang tercipta suatu semangat kerjasama antara LSM, Pemerintah dan ABRI yang dilandasi semangat keterbukaan, demi peningkatan peran serta masyarakat dalam civil society

Kastorius Sinaga
(Direktur INPI-Pact)

Pokok-Pokok Pikiran Pidato Wakil Gubernur Lemhannas

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan demokratisasi dan pengembangan peran serta masyarakat:

A. **Sejarah:** Berapa usia negara-bangsa yang bersangkutan, bagaimana cara memperoleh kemerdekaannya, apa yang diwarisi olehnya dari pemerintahan penjajah, seberapa kuat jati diri dan kesadaran kebangsaannya. Demokratisasi hanya mungkin berkembang dalam rasa persatuan dan kesatuan dalam jati diri negara-negara yang kuat.

B. **Penduduk:** Berapa jumlah penduduknya, berapa laju pertambahan penduduk setiap tahun. bagaimana corak kerukunan hidup antar suku, agama dan golongan. bagaimana pesebarannya dalam luas wilayahnya. berapa jumlah kalangan terdidik, terpelajar, kalangan pemikir dan cendekiawan, wartawan, pengusaha, pimpinan tentara (berapa banyak orang yang mampu berfikir dan memperjuangkan upaya demokratisasi karena kebutuhan pokok sosial-ekonominya sudah terpenuhi?), seberapa besar jaminan tingkat partisipasi golongan minoritas dalam "arus utama" kebudayaan nasional. Demokratisasi memerlukan masyarakat madani yang taat azas pada perubahan struktur sosial kearah yang menyantun masyarakat yang paling miskin, terbelakang dan terasing.

C. **Geografi dan Sumber Kekayaan Alam:** Bagaimana letak geo-politik dan geo-ekonomi negara yang bersangkutan (negara daratan berbeda dengan negara kepulauan), keadaan alam menentukan tingkat kemudahan-kesukaran proses interaksi melalui sistem transportasi, bagaimana persebaran sumber kekayaan alam itu, siapa yang mengelola pengolahan dan pemasaran sumber kekayaan alam. Demokratisasi langsung berhubungan dengan masalah pengolahan

dan alokasi sumber-sumber kekayaan material yang lebih adil dari segi produksi, alokasi dan pemberian imbalan.

1. Masyarakat madani (civil society) sebagai bagian dari proses demokratisasi:

Di Eropa dan Amerika Utara, proses demokratisasi dilaksanakan secara bertahap dengan jangka waktu 85-100 tahun, masyarakat madani lahir sebagai kekuatan lapisan pedagang menengah yang merubah kedudukan istimewa golongan tuan tanah/bangsawan, dasar negara dan pegangan konstitusional kuat diterima sebagai aturan dasar sehingga persoalan pergantian pemerintahan tidak mengguncangkan sendi-sendi kenegaraan, konsep 'oposisi loyal' bermakna bahwa kepercayaan akan sistem sangat tinggi, kelembagaan politik, termasuk kepartaian, berkembang dengan pesat, pergerakkan buruh setelah tahun 1920 menjadi tulang punggung proses demokratisasi dari tengah dan bawah.

Hubungan antara ketentuan hukum dengan dinamika masyarakat bekerja secara saling mengisi, sehingga kepatuhan pada sistem ditunjang oleh efektifnya perwakilan rakyat melalui partai poltik dan parlemen. Demokratisasi yang dipelopori oleh buruh bekerja sama dengan gerakan-gerakan lapisan menengah seperti kelompok profesional, lembaga swadaya masyarakat, pers bebas dan serikat-serikat sekerja. Keterkaitan dan kesepadanan antar golongan-golongan ini membangun jaringan kerjasama yang saling menunjang dan partai politik menyalurkannya pada tingkat parlemen. Hasilnya, demokratisasi yang bukan saja bertahap, melainkan juga berkesinambungan.

2. Demokratisasi dan partisipasi pada abad ke-20:

India memilih jalan demokratisasi parlementer, sekuler dan federal. Demokrasi terjadi untuk yang mampu berada dibawah pemerintahan partai dominan Congress Party (lapisan menengah, administrasi negara, pers, pengusaha menengah), yang berjumlah sekitar 250 juta dari 900

juta penduduk. Demokrasi politik dilaksanakan dalam kondisi ekonomi sosial yang menyedihkan. Biaya yang dipikul adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang meluas.

Demokrasi Jepang dipasang oleh Amerika, tetapi kekuatan ekonomi kalangan pengusaha kuat tetap dominan. Sehingga dalam kenyataan, Jepang dibawah partai LPD menjadi negara atau partai. Faktor dukungan dana dari perusahaan-perusahaan raksasa amat dominan, sehingga demokrasi Jepang memikul biaya dikendalikan oleh oligarki ekonomi.

Indonesia menerapkan sistem multipartai dalam keadaan belum ditegaskannya dasar negara. Penyelenggaraan kehidupan politik berhasil dimantapkan setelah melewati beberapa tahapan, yaitu juli 1959, Seminar Angkatan Darat II Agustus 1966/Seminar Pertahanan Keamanan November 1967, penegasan P-4 November 1978 dan paket undang-undang 1985. Setelah 30 tahun membangun, jumlah lapisan menengah Indonesia baru mencapai 18 juta dari jumlah 200 juta orang, dengan PDB perkapita 1300 dollar AS. Ukuran dasar untuk pemantapan demokratisasi dan partisipasi masyarakat adalah sekitar 6000 dollar AS dan 30% anggota masyarakat bahagian lapisan menengah. Peran ABRI dalam menjaga kerangka kehidupan politik nasional, prospek tampilnya kalangan sipil; masalah pembenahan organisasi, hari depan demokratisasi dan partisipasi Indonesia.

Dari uraian di atas, jadi sangat jelas bahwa untuk mewujudkan Civil Society, memerlukan ruang dan waktu yang cukup lama. Setidaknya dari gambaran pengalaman negara-negara lain, dibuktikan bahwa diperlukan dukungan serta kesiapan berbagai lapisan untuk mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan.

Prof.Dr.Juwono Sudarsono
(Wakil Gubernur Lemhanas)

BAB I

Demokrasi, LSM dan Peran Serta Masyarakat

ABRI Sebagai Kekuatan Politik dalam Kesinambungan Pembangunan

Mayjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono
(Asisten Sosial Politik Kassospol ABRI)

I. Pendahuluan

Syukur alhamdulillah, melalui makalah yang berjudul, 'ABRI Sebagai Kekuatan Politik dalam Kesinambungan Pembangunan', saya memiliki kesempatan untuk mengedepankan sebuah substansi penting, yaitu: makna kesinambungan pembangunan. Dalam pikiran saya, rumusan kesinam-bungan pembangunan mengandung berbagai hal mendasar yang jika tidak dipahami benar-benar, sering mendatangkan persoalan dan perdebatan yang tidak konstruktif. Jelasnya, cukup banyak kritik dan kecaman terhadap kebijakan, strategi dan konsep-konsep pembangunan karena kurangnya pemahaman yang utuh terhadap pembangunan itu sendiri.

Saya merasa bertambah senang, karena topik yang harus saya sampaikan dalam dialog sehari ini mengupas bagaimana peran sosial politik ABRI dalam kesinambungan pembangunan. Melalui bahasan yang akan saya kedepankan ini saya berharap dapat menjawab berbagai isu kritis dan aktual seputar sikap, posisi dan peran ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari interpretasi terhadap topik pemikiran yang diberikan kepada saya, secara singkat akan saya kupas empat agenda utama, yakni:

- Makna Kesinambungan pembangunan
- Komitmen ABRI dalam Kehidupan Nasional
- Tantangan Nasional Memasuki Abad 21
- Peran serta ABRI dalam Menunjang Kesinambungan Pembangunan.

Meskipun saya tidak di minta untuk secara spesifik menyumbangkan pemikiran tentang pengembangan peran serta masyarakat, peluang yang tersedia pada dialog ini, tentu tidak akan saya sia-siakan untuk ikut mem-bulatkan tujuan dialog yang amat baik ini, yaitu: meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, termasuk mengatasi hambatan yang ada.

II. Makna Kesinambungan Pembangunan

Dibalik kata-kata kesinambungan pembangunan atau mengapa pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, pertama-tama harus kita pahami bahwa membangun sebuah bangsa, sebuah negara nasional (nation state) adalah sebuah upaya besar sekaligus merupakan proses jangka panjang. Membangun negara nasional Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa, bertanah air seluas Eropa Barat, baru merdeka setelah Perang Dunia II dan setelah dijajah oleh bangsa lain selama 350 tahun, tentu bukan pekerjaan biasa yang sepi dari tantangan, permasalahan dan risiko. Sebagai perbandingan: sejak Revolusi Industri, pembangunan bangsa Inggris telah berlangsung 140 tahun, sejak deklarasi kemerdekaannya. Pembangunan bangsa Amerika Serikat telah berlangsung 221 tahun. Jepang yang kini maju dan kuat telah menapaki upaya pembangunan yang intensif dan

ekstensif sejak Restorasi Meiji yang berlangsung 130 tahun lalu.

Dalam bentangan waktu yang panjang, negara-negara itu, dan semua bangsa-bangsa di dunia yang telah dahulu membangun dan kini telah menjadi bangsa yang maju, mengalami berbagai pasang surut, jatuh bangun dan gejolak-gejolak dalam berbagai aspek-aspek kehidupan. Mereka tidak membangun sekali jadi. Dari masa ke masa terus dilakukan perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan.

Lalu apa makna ini semua bagi bangsa Indonesia? Makna dan pesan pertama yang perlu disampaikan adalah diperlukannya sikap yang positif - konstruktif serta pemahaman yang utuh terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia yang dewasa ini baru memasuki pembangunan jangka panjangnya yang kedua.

Pesan kedua, jika kita semua memahami bahwa bangsa Indonesia tengah berada pada masa transisi dengan tahapan (stage) pembangunan seperti sekarang ini, maka segala bentuk pemikiran yang menyangkut konsep, sistem, model dan pilihan yang ditawarkan dalam bidang-bidang pembangunan janganlah mengimpor, meniru dan merancang bangun yang hanya layak dan tepat bagi negara yang telah mapan dan maju.

III. Komitmen ABRI dalam Kehidupan Nasional

Sejak kelahirannya, ABRI memang bukanlah tentara reguler yang hanya mengemban tugas untuk berperang dan bertempur semata. Jati diri TNI ABRI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional Indonesia serta kepedulian, tanggung jawab, dan konstribusinya dalam memperjuangkan nasib dan masa depan bangsa, telah menjiwai, melandasi dan membentuk komitmen dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Abstraksi dan rangkaian panjang pengabdian ABRI inilah, yang

kini kita formulasikan dalam jiwa dan nafas peran kembar ABRI sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan kekuatan sosial politik. Jejak pengabdian dan panggilan tugas ini pulalah yang merupakan paradigma dan hakikat Dwi Fungsi ABRI, yaitu: jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dibidang pertahanan keamanan maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam kerangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks kehidupan dan pembangunan bangsa, ABRI mengemban misi melindungi kepentingan nasional, mangamankan kesinambungan pembangunan, serta menjamin berlangsungnya kehidupan bangsa yang semakin maju, adil, mandiri, aman dan sejahtera. ABRI dituntut untuk mampu mengatasi segala bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, melalui upaya pertahanan dan upaya keamanan secara efektif dan efisien, dalam keselarasan dan keseimbangan perannya sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan kekuatan sosial politik.

Sebagai kekuatan sosial politik, sebagaimana yang tertera dalam topik pemikiran ini, ABRI harus memahami sejarah dan tetap peduli pada nasib dan masa depan bangsanya. Komitmen, tanggung jawab dan kepedulian ABRI dalam gerak kehidupan bangsa harus senantiasa diwujudkan dan diaktualisasikan melalui peran soaial politik ABRI yang sesuai dengan tuntutan keadaan dan aspirasi rakyat.

Dwi Fungsi ABRI dimaknakan dan diwujudkan dalam sumbangan dan peran serta ABRI yang posistif dan konstruktif dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, mulai dari tingkat strategis sampai dengan yang berkaitan dan menyentuh kepentingan rakyat terbawah. Inilah sesungguhnya misi dan komitmen kebangsaan ABRI

yang akan tetap dipertahankan sepanjang masa, bersama-sama kekuatan perjuangan bangsa lainnya.

IV. Tantangan Nasional Memasuki Abad 21

Kita pahami bersama bahwa dewasa ini kita hidup dalam era globalisasi, modernisasi dan liberalisasi ekonomi yang kian kuat getaran gelombangnya. Dalam dua dasawarsa terakhir telah muncul berbagai realitas dan kecendrungan baru yang memaksa dunia merubah dan memperbaharui tatanan masyarakatnya yang nampaknya kini belum final. Meskipun ada angin baru yang lebih sejuk di bidang keamanan, namun kompetisi dan konflik kepentingan tidak berarti surut. Kepentingan nasional Indonesia akan berhadapan dengan kepentingan bangsa lain, serta harus berhadapan pula dengan berbagai permasalahan dalam negeri yang mendasar.

Oleh karena itu tantangan nasional yang kita hadapi dewasa ini, tidak lain adalah bagaimana melindungi kepentingan bangsa dalam dunia yang semakin kompetitif dan terus berubah.

Jika kita berfikir dalam lingkup yang besar, dalam dimensi yang luas, serta dalam jangkauan waktu yang jauh ke depan, yang kita sebut sebagai tantangan nasional adalah segala bentuk tantangan yang merintangi pencapaian cita-cita, tujuan dan kepentingan bangsa. Para pendiri negara-nasional telah merumuskan cita-cita nasional yang luhur yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam pembukaan konstitusi, telah dirumuskan 4 tujuan nasional Indonesia. [1] Sedangkan kepentingan nasional Indonesia telah

---

1. *Secara eksplisit empat kerangka tujuan nasional Indonesia telah di cantumkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni: ".....yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....."*

pula menjadi acuan, sekaligus sasaran pembangunan nasional yang terus kita laksanakan.

Saya berpendapat bahwa kepentingan nasional yang utama memasuki abad 21 pada hakekatnya adalah berlangsung dan suksesnya pembangunan nasional sehingga mampu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, mandiri, aman dan sejahtera.

Dihadapkan pada perkembangan yang global regional dan nasional berikut implikasinya, maka terdapat tiga elemen mendasar kepentingan utama bangsa Indonesia, yakni:

1. Tetap eksis dan berlangsungnya Pancasila, UUD 1945 dan keseluruhan sistem nilai bangsa.
2. Tetap tumbuh dan semakin kuatnya ketahanan ekonomi nasional disertai dengan pemerataan yang adil, semakin mantapnya kehidupan Demokrasi Pancasila, ditopang oleh keamanan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
3. Semakin berkembangnya kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia serta semakin mantapnya peran aktif-konstruktif dalam percaturan global.

Inilah sesungguhnya kepentingan dan tantangan nasional yang kita hadapi dewasa ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, ABRI mengemban tugas untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga tantangan-tantangan nasional inipun harus mampu dijawab oleh ABRI bersama kekuatan perjuangan bangsa lainnya.

V. Aktualisasi Peran ABRI dalam Menunjang Kesinambungan Pembangunan

Gangguan dan ancaman terhadap kesinambungan pembangunan, dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini dapat berdimensi dan melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan. Gerakan dan cara yang ditempuh dapat terbuka (overt)— misalnya kerusuhan sosial—, dapat pula tertutup atau sembunyi (covert)— misalnya, gerakan subversi. Jika ancaman itu bersifat politik dan keamanan, tujuan yang ingin dicapai dapat berupa gerakan untuk membuat kerusuhan, untuk merebut kekuasaan, dan dapat pula untuk mengganti ideologi atau konstitusi negara.

Dalam dunia yang terus berubah, yang memiliki berbagai permasalahan yang kompleks, beragam dan serba muka, spektrum dan ragam ancaman terhadap kesinambungan pembangunan amat luas. Mengahadapi ini semua, sesuai dengan jati diri, peran dan misi ABRI, pada hakekatnya ABRI mengemban 2 jenis tugas yaitu:

1. Menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap kesinambungan pembangunan.
2. Ikut perperan serta, mendorong dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang guna mencapai keberhasilan yang setinggi-tingginya.

Implementasi dan aktualisasi peran ABRI untuk menangkal, mencegah dan menanggulangi gangguan terhadap kesinambungan pembangunan dapat dilaksanakan melalui upaya pertahanan dan keamanan negara dan upaya penegakkan disiplin nasional. Peran untuk mendorong keberhasilan pembangunan dapat diwujudkan melaui upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta peningkatan kualitas kehidupan politik Demokrasi Pancasila.

Dalam upaya menegakkan stabilitas nasional, langkah-langkah yang ditempuh ABRI dapat berupa:

1. Mencegah dan menetralisasi prakondisi dan akselerasi tahapan gangguan stabilitas.

2. Mencegah dan menanggulangi kegiatan subversi dan unsurjensi.
3. Mencegah berkembangnya kekerasan, radikalitas dan anarki.

Peran serta dan upaya ABRI untuk ikut meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat berupa:

1. Melaksanakan Bhakti ABRI (yang telah berlangsung selama 18 tahun), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa tertinggal atau kalangan keluarga pra sejahtera. Bentuk Bhakti ABRI cukup banyak, antara lain AMD, ABRI Manunggal KB & Kesehatan, ABRI Manunggal Transmigrasi, ABRI Manunggal Reboisasi, ABRI Manunggal Buta Aksara, dan lain-lain.
2. Ikut mengambil bagian dan menggerakkan berbagai gerakan nasional, misalnya: Gerakan Orang Tua Asuh, Gerakan Kesetiakawanan Sosial, dan lain-lain.

Dalam kehidupan politik bangsa, upaya yang dilakukan ABRI dalam meningkatkan kualitas kehidupan politik Demokrasi Pancasila dapat berupa:

1. Meningkatkan kualitas komunikasi dan partisipasi politik.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga politik, terutama pada infra struktur politik.
3. Ikut membina generasi muda bangsa.
4. Ikut membina generasi muda bangsa
5. Menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika dirinci dan dijabarkan, peran ABRI dalam upaya memelihara kesinambungan pembangunan tentu akan luas sekali. Namun disamping tidak perlu, juga bukan menjadi tujuan dan pemikiran ini.

Yang perlu dikedepankan adalah peran dan embanan tugas ini

dilaksanakan, baik dalam kapasitas atau melalui jalur supra struktur politik, infra struktur politik, Keluarga Besar ABRI , maupun masyarakat luas. Sebagaimana yang telah dikedepankan sebelumnya, peran sosial politik ABRI bukan untuk kepentingan ABRI, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam realitasnya peran sosial politik ini juga terus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Konsep Tut Wuri Handayani yang pada tahun-tahun belakangan ini sering di kemukakan, menunjukkan bahwa perwujudan peran sosial politik ABRI tidak statis, tetapi dinamis.

VI. Penutup

Menutup pemikiran ini, ada satu substansi yang perlu saya kedepankan yakni menyangkut pertanyaan dan isu-isu kritis tentang partisipasi masyarakat (yang kebetulan tidak dimasukkan ke dalam topik pemikiran saya). Berkaitan dengan pemikiran untuk meningkatkan partisipasi politik dalam sistem dan praktek politik di Indonesia, saya akan menyampaikan berbagai pertanyaan penting (key questions) sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi politik merupakan salah satu dari komponen dan sub sistem politik, sehingga harus "dibaca" secara kontekstual dan integral dalam keseluruhan sistem.
2. Dapatkah kita membangun partisipasi politik yang berjarak dengan budaya politik, sistem nilai dan tata krama masyarakat/bangsa yang bersangkutan?
3. Dimanakah titik toleransi yang kita sepakati, jika bentuk partisipasi politik menyentuh tertib masyarakat dan stabilitas.

Jika pertanyaan-pertanyaan yang saya kedepankan ini dipandang

sebagai terlalu "security deterministic", sesungguhnya tidak demikian. Sebagai seorang yang hampir 25 tahun bertanggung jawab, bertugas dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan stabilitas tentu saya memiliki hak untuk berharap dan berupaya meningkatkan partisipasi politik yang lebih sehat, konstruktif, dan dinamis, namun sekaligus juga tertib. Jika Presiden Perancis, Valery Giscard d'Estaing, pernah menekankan bangsanya agar dapat membangun suatu demokrasi yang tertib, yakni sebuah demokrasi yang memiliki pranata, serta mampu menjamin stabilitas dan efisiensi[2] , Jika Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, mengingatkan bangsanya bahwa kebebasan hanya akan berlangsung dengan baik bila disertai tanggung jawab, yaitu kebebasan berbicara yang disertai tanggung jawab untuk berkumpul dengan damai/tertib; dan kebebasan pers yang disertai tanggung jawab untuk menjamin pemberitaan yang benar, akurat dan "fair" [3], Jika Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, berpendapat bahwa berhubung negara-negara di Asia memiliki tingkat/tahap pembangunan ekonomi yang berbeda-beda, maka ia menyarankan sebaiknya tiap-tiap negara menentukan jalannya sendiri ke arah demokrasi dan civil society sesuai langkah masing-masing,[4] maka terasa arif, tepat dan tealistik, jika Bapak Presiden Soeharto mengamanatkan: ".... Kita semua harus mempertimbangkan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih mengenai cara-cara berkampanye dalam pemilihan umum yang akan datang. Kita tidak ingin ada korban, meskipun untuk demokrasi. Dan demokrasi memang tidak perlu menelan korban."[5]

---

2. *Susilo Bambang Yudhoyono, Mayjen TNI, Dwi Fungsi ABRI: Implementasi dan Aktualisasi di Lapangan Tugas (Ceramah di Seskoad, Bandung, 4 November 1996).*
3. *Bill Clinton, Between Hope and History: Meeting America's Challenges for the 21 st Century (New York: Randon House, Inc 1996), 61-62*
4. *Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance (Singapore: Times Books International, 1996), 51.*
5. *Presiden Soeharto, Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, 16 Agustus 1997.*

Semoga pandangan, pemikiran dan perkataan para pemimpin dunia tersebut menambah wawasan, pengetahuan dan kematangan kita bersama dalam melihat sebuah dimensi penting. Yaitu demokrasi dan partisipasi politik, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta, masa kini dan masa depan.***

Peningkatan Peran Serta Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Manuwoto

Pendahuluan

Milenium baru telah dihadapan mata. Milenium yang memiliki berbagai ciri yang berbeda dengan milenium sebelumnya, membuat masyarakat dunia semakin bertanya tentang sejauhmana konsep-konsep dasar pembangunan ekonomi dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara ber-kembang. Berdasarkan berbagai kajian dan bukti empiris, konsep yang mulai dikembangkan setelah berakhirnya PD II, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, dinilai perlu dicarikan alternatifnya. Puncak kegiatan untuk mendapatkan alternatif baru tersebut ditandai dengan dilangsungkannya KTT Pembangunan Sosial di Denmark pada tahun 1994. Pada konferensi tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan dunia, institusi Bretton Woods digugat secara global. Disamping keberhasilan yang ditunjukkan ternyata konsep yang dikembangkan oleh institusi ini justru menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara negara kaya dan yang miskin, dan juga antara golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan yang berada di bawah garis kemiskinan.

Upaya untuk mencari alternatif lain ini semakin gencar di dekade

---

1. *Makalah ini disampaikan pada acara Dialog Sehari antara ABRI dan LSM tentang "Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Civil Society" yang diadakan oleh LEMHANNAS dan INPI-Pact di Jakarta tanggal 8 September 1997.*
2. *Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan.*

90-an. Salah satu alternatif yang kemudian banyak dilirik dan dicoba diterapkan adalah melihat pembangunan dalam konteks yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang. Untuk itu berbagai pihak kemudian manyadari bahwa manusia, atau masyarakatlah yang harus dilihat sebagai titik sentral dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada aspek ekonominya,atau instrumen-instrumennya, hanya akan memperbesar peluang bagi kelompok masyarakat yang memang sudah mampu dan siap untuk menggunakan instrumen tersebut. Disinilah sebenarnya inti persoalannya, yaitu ketidakseimbangan dalam ketidak-mampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terdapat dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang berlanjut, ketidak-seimbangan ini akan semakin besar, yang pada gilirannya akan mengakibatkan semakin melebarnya jurang kesenjangan antar berbagai pelaku pembangunan.

Dari sinilah kemudian berkembang pendekatan pembangunan yang lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persolannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Kelompok masyarakat yang tertinggal harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan men dinamisasikan potensinya atau dengan kata lain, memberdayakannya.

Dilain pihak juga disadari bahwa pemberdayaan harus diiringi oleh upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat. Pemberdayaan bahkan harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan, akses kepada masyarakat agar mereka dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya bagi pembangunan.

Dalam konteks pemikiran tersebut, makalah ini ditulis dengan maksud untuk mencoba mengupas mengenai berbagai hal pokok yang menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat seperti apakah yang

dimaksud dengan pemberdayaan, siapakah yang harus diberdayakan dan mengapa harus diberdayakan. Bagian selanjutnya dari makalah ini kemudian mencoba mengupas berbagai hal pokok mengenai peran serta dan upaya peningkatannya cara untuk melakukan pemberdayaan. Dalam kerangka ini akan dicoba membahas salah satu faktor utama yang sangat penting bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yaitu perilaku para pelaksana pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum, mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membuat mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat.

Dalam kerangka pikiran tersebut, upaya untuk memperdayakan masyarakat haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tersebut untuk berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap kelompok masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalau memang demikian, maka masyarakat tersebut akan punah. Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Langkah-langkah untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kemudian harus diikuti oleh berbagi langkah positif lainnya, yaitu penyediaan berbagai

masukan (inputs), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang ada yang akan membuat masyarakat menjadi semakin mempunyai daya.

Pemberdayaan juga mengandung arti memberikan perlindungan. Dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang lebih kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah menjadi amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Walaupun demikian harus ditegaskan disini bahwa melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi masyarakat yang lemah dari kemungkinan mereka berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Pengisolasian hanya berarti memperlemah dan mengkerdilkan masyarakat yang sudah lemah ini. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta ekspoitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Pemberdayaan juga bukan hanya ditujukan pada penguatan terhadap individu anggota masyarakat, tetapi harus pula mencakup pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab merupakan bagian utama yang harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan. Demikian pula, upaya ini harus ditujukan pada langkah-langkah pembaharuan terhadap lembaga-lembaga sosial serta pengintegrasiannya kedalam kegitan pembangunan, dan yang terpenting adalah peningkatan peran serta masyarakat di dalamnya.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya menjadi sangat penting dalam konteks pemberdayaan ini. Bertitik tolak dari pemikiran seperti diuraikan di atas, maka pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan upaya pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman

demokrasi.

Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada tiap individu atau kelompok masyarakat akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daerahnya secara keseluruhan. Baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam di daerah dimana masyarakat itu berada dapat diharapkan akan meningkat produktivitasnya. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Masyarakat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Diatas telah diuraikan secara singkat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial didalamnya. Dapat dilihat dalam konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan ekonomi yang hanya tidak melihat masyarakat sebagai obyek, atau sasaran pembangunan, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Konsep ini sangat diwarnai oleh pendekatan-pendekatan yang partisipatif dan sarat dengan upaya-upaya yang ditujukan pada peningkatan kemampuan masyarakat di dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu dalam jangka panjang konsep ini dapat diharapkan akan jauh lebih sustained.

Lebih jauh dapat pula dilihat bahwa konsep pemberdayaan masyarakat ini tidaklah semata-mata hanya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi manusia saja, atau sekedar menyiapkan

mekanisme bagi pencegahan proses pemiskinan yang berkelanjutan. Konsep ini juga tidak memper-tentangkan pertumbuhan dengan pemerataan karena memang keduanya tidak perlu dikotonomikan. Konsep ini justru mencoba melepaskan diri dari perangkap zero sum-game dan trade off antara pertumbuhan dan pemerataan. Titik tolaknya adalah suatu pandangan bahwa dengan penguatan terhadap semua pelaku pembangunan untuk menciptakan landasan yang lebih luas dan kuat untuk pertumbuhan. Pada gilirannya landasan yang kuat ini akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara berkelanjutan.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Gagasan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pada dasarnya timbul sebagai suatu reaksi terhadap pembangunan yang dilaksanakan dengan cara-cara yang sentralistis, melalui jalur-jalur birokrasi yang tidak efisien, serta pendekatan yang lebih menekankan pada hasil dari pada prosesnya sendiri. Pandangan ini terutama timbul baik dari praktisi-praktisi maupun pengamat-pengamat yang selalu berkecimpung dan bergulat dalam skala mikro. Dari kaca mata ini keberhasilan pembangunan ekonomi yang ditandai oleh angka-angka statistik makro tidaklah sepenuhnya mencerminkan perkembangan mikro empiris. Hal yang tampak adalah suatu kontradiksi antara proses marjinalisasi ekonomi rakyat, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penggusuran di satu pihak dan ekonomi rente, monopoli dan konglomerasi dipihak lain.

Walaupun demikian bila dilihat lebih jauh sebenarnya dua cara pendekatan tersebut tidaklah harus dipertentangkan atau didikotomikan. GBHN 1993 sendiri sarat dengan muatan keduanya, dimana satu pihak pertumbuhan ekonomi secara makro harus diupayakan, tetapi di lain pihak juga mengamanatkan berbagai

kebijaksanaan yang mempunyai nuansa pemberdayaan kerakyatan. Bahkan pendekatan pemberdayaan dalam repelita VI telah dijabarkan secara luas dalam bentuk-bentuk program-program seperti IDT, P3DT, dan Uji Coba Otonomi Tingkat II. Hal tersebut jelas merupakan bukti dari komitmen terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah semakin operasional.

Khusus mengenai peran serta masyarakat bila dikaji lebih jauh sebenarnya secara normatif bahkan telah mempunyai landasan yang sangat kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik secara filosofis, konstitusional dan budaya.

Secara filosofis pembangunan nasional Indonesia ditujukan bagi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan nasional bersumber dari pengakuan terhadap eksistensi dari dan ditujukan bagi manusia Indonesia tersebut. Masyarakat sebagai kumpulan individu diakui keberadaannya sebagai suatu entiti yang bersifat dinamis dan unik. Pengakuan ini kemudian dituangkan dalam bentuk komunikasi yang terbuka, timbal balik dan saling memberi serta saling menerima. Secara konstitusional peran serta masyarakat diamanatkan oleh UUD 45 dan GBHN serta sebagai perangkat perundang-undangan dibawahnya. Sedangkan secara budaya peran serta masyarakat bahkan dapat dijumpai jauh sebelum dicanangkannya PJP I. Bentuk-bentuk seperti gotong royong, urun rembug, sambatan, gawe banjar, gugur gunung, martahi dan marsialapari merupakan bagian dari budaya Indonesia yang dapat dijumpai di berbagai pelosok dan nusantara.

Disamping landasan yang kokoh dapat pula dilihat tiga alasan pokok mengapa peran serta masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Pertama adalah kebutuhan obyektif. NKRI yang secara geografis merupakan kepulauan dengan luas wilayah sekitar 2 juta

km2, secara administratif terdiri dari 27 propinsi, 313 kabupaten/ kotamadya, dan 65.252 desa/kelurahan, serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa pada tahun 1997 kesemuanya harus dapat dijangkau oleh berbagai program pembangunan. Kedua adalah keharusan politis. Melalui berbagai kebijaksanaan pemerintah, peran serta masyarakat dalam pembangunan telah menjadi kebijaksanaan formal yang kemudian dijabarkan dalam program-program pembangunan. Hal ini merupakan langkah-langkah politis yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, terutama oleh pemerintah sendiri. Ketiga adalah desakan eksternal. Berbagai bentuk bantuan bagi pendanaan pembangunan di Indonesia banyak yang didisain agar kontribusi peran serta masyarakat dapat semakin di perbesar.

Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan pengamatan sampai saat ini dapat dilihat dan dirasakan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan di Indonesia ini semakin meningkat. Peningkatan ini tentu saja merupakan suatu hal yang mengembirakan. Semua pelaku pembinaan semakin menyadari bahwa tanpa peran serta aktif dari masyarakat, maka pembangunan hanyalah menghasilkan produk-produk yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun demikian, juga disadari bahwa upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang dirasakan sangat berpengaruh bagi upaya tersebut berakar pada sikap dan prilaku para pelaksana pembangunan.

Sikap dan perilaku ini berakar pada budaya yang antara lain dicirikan oleh: (a) budaya paternalistik, budaya manut, sumuhun dawuh, terserah bapak/ibu saja, dan (b) kebiasaan untuk dilayani, kebiasaan memerintah, kebiasaan selalu dituruti dan tidak mau di

bantah. Kesemua hal tersebut menjadi hambatan, masalah dan juga tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Budaya yang harus ditumbuhkan adalah yang sebaliknya, yaitu: (a) berani mengemukakan pendapat, berani mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, berani berbeda pendapat, berani mengambil inisiatif, dan (b) senang melayani, senang bertukar fikiran dan bermusyawarah, tidak tabuh terhadap kritikan, dan mau mendengar keluhan atau aspirasi orang lain.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, perlu ada keyakinan dari para pelaku pembangunan, terutama pemerintah bahwa: (a) masyarakat mempunyai potensi untuk membangun dirinya sendiri, (b) pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya akan terjamin lebih berkelanjutan dibandingkan pembangunan yang prosesnya selalu datang dari atas, dan (c) kepercayaan masyarakat akan kemampuan dirinya sendiri dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama yang harus terus ditumbuhkan.

Berdasarkan keyakinan tersebut diatas, maka sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan oleh para pelaku pembangunan antara lain meliputi:

1. Adanya keyakinan dalam diri setiap pelaku pembangunan bahwa pembangunan yang mengutamakan peran serta merupakan pendekatan yang paling tepat untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Kesediaan untuk menerima dan menempatkan masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam kegiatan pembangunan.
3. Pandangan bahwa kriteria keberhasilan pembangunan bukanlah semata-mata berupa hasil akhir fisiknya, seperti panjang jalan, jumlah bangunan pengairan, dan angka kenaikan produksi. Akan

tetapi juga harus mencakup aspek-aspek prospek pembangunan tersebut, terutama sejauh mana masayarakat telah meningkat peran sertanya dalam keseluruhan proses pembangunan.

4. Keterbukaan terhadap kenyataan bahwa masyarakat mempunyai pendapat, cara dan pengalaman khas dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian, ada kemauan unutk mendengar dan memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap permintaan dan saran-saran dari masyarakat.
5. Kesediaan untuk semaksimal mungkin melakukan perundingan dan pembahasan dengan pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat sendiri.
6. Keyakinan bahwa perpaduan antara pengetahuan teknis yang berasal dari pendidikan formal dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan mendatangkan hasil akhir yang lebih baik, lebih memuaskan dan lebih sustained.

Penutup

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alternatif baru dalam pelaksanaan pembangunan. Suatu konsep yang merangkum berbagai faktor ekonomi maupun sosial diperkirakan sesuai untuk menjawab berbagai tantangan perubahan yang dibawa oleh milenium baru. Dapat diharapkan bahwa konsep pembangunan ini mampu meningkatkan baik nilai tambah ekonomi maupun nilai tambah sosial dan budaya yang ada pada masyarakat. Kuncinya adalah pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Disini pemberdayaan menjadi sangat terkait dengan peran serta dan upaya peningkatannya dalam pembangunan.

Peran serta masyarakat sebenarnya mempunyai landasan yang kokoh dalam pembangunan nasional, baik secara filosofis, konstitusional maupun budaya. Disamping itu, berdasarkan kondisi geografis dan demografisnya, pelaksanaan dan jangkauan pembangunan yang harus dilaksanakan akan sulit menjamin keberhasilan tanpa ada upaya peningkatan peran serta masyarakat. Masalahnya adalah faktor apa yang paling pokok dalam menentukan keberhasilan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ini.

Dalam konteks tersebut, dipandang bahwa perilaku para pelaksana pembangunan merupakan salah satu faktor pokok yang masih perlu mendapat pembenahan. Pentingnya sikap dan perilaku ingin ditonjolkan dalam kesempatan ini mengingat hal tersebut merupakan refleksi dan sekaligus resultante dari berbagai faktor, internal maupun eksternal, yang ada di dalam diri seorang maupun kelompok masyarakat. Tanpa ada upaya yang nyata bagi perubahan perilaku para pelaksana pembangunan maka dapat diperkirakan bahwa pembangunan nasional akan sangat sulit mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.***

Diskusi Sesi I

Pembicara:
- Manuwoto: Peningkatan Peran Serta Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat"
- Mayjen TNI Susilo Bambang Yuhdoyono: ABRI Sebagai Kekuatan Sosial - Politik Dalam Kesinambungan Pembangunan

Moderator: Soebagio

PERTANYAAN DARI PESERTA:

Roostien Ilyas (Yayasan Nanda Dian Nusantara):

Organisasi masyarakat desa, seperti LKMD dan PKK, kegiatannya bersifat kaku atau tidak aktif. Dalam setiap kegiatannya, ketergantungan terhadap perintah kepala desa sangat tinggi. Di satu sisi, jabatan ketua PKK diharuskan menjadi tanggung jawab istri kepala desa. Walau tak jarang ia (istri kepala desa-red) buta huruf sekalipun. Kondisi seperti ini, mengakibatkan program organisasi tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Bagaimana pendapat Pak Manuwoto tentang upaya pemberdayaan organisasi masyarakat desa itu ?

Kepada Pak Bambang, saya ingin menanyakan soal kemanunggalan ABRI dan rakyat. Bagi masyarakat perkotaan, kemanunggalan ABRI terlihat masih samar-samar. Sering terlihat bagaimana keberpihakan ABRI pada pemerintah.Padahal ABRI, seperti yang tertulis dalam SAPTA MARGA, merupakan abdi bangsa dan negara, bukan abdi pemerintah. Keberadaan ABRI berfungsi

menjembatani rakyat dengan pemerintah. Tapi, yang sering terjadi, bila rakyat sedang bergejolak, misalnya, langsung diusut siapa yang menunggangi? Seharusnya ABRI berpikir mengapa rakyat sampai dapat ditunggangi?

Edy Siswanto **(Rakyat biasa dari Pondok Pinang),**

Pak Manuwoto, dalam sistim yang kita anut di Indonesia ini,apakah memang ditetapkan ambang batas perberdayaan ? Kalau memang ada, siapa yang berwenang menentukan batasan itu?. Penguasa atau rakyat? Pertanyaan kedua, lebih bersifat teknis. Sebenarnya berapa persen anggaran negara yang dialokasikan untuk mencapai pemberdayaan itu? Jangan-jangan kita sering menuntut atau mendiskusikan pemberdayaan, tapi sebenarnya anggaran untuk itu terlalu kecil, bila dibandingkan untuk kebutuhan yang lainnya.

Yang juga perlu diperhatikan, kalau kita membicarakan pemberdayaan atau melakukan kegiatan-kegiatan ditingkat masyarakat, selalu diikuti dengan kata-kata "tetapi". Misalnya, boleh adakan gerakan-gerakan partisipasi, **tetapi** jangan melanggar nilai-nilai yang dianut di negara kita. Nah, sampai saat ini kita belum tahu betul minimal dari stabilitas nasional itu seperti apa? Gerakan partisipasi apa saja yang bisa diterima pemerintah, agar pembangunan bisa tetap berjalan? Arah pembangunan kita sudah bisa berhasil, terutama di bidang ekonomi. Yang kita saksikan disini sebagian besar sudah punya mobil, bahkan pesawat pun dapat dibeli. Pokoknya, pembangunan ekonomi sangat sukses. Untuk itu, tentu saja, kita beri applaus kepada para pengusaha kita. Yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan bidang lainnya.

Dalam konteks ini saya mau bertanya, bagaimana pandangan *Jendral Bambang* agar pembangunan bisa merata? Misalnya,

bagaimana meningkatkan pembangunan politik atau partisipasi rakyat? Tadi Jendral Bambang menyebutkan, ibaratnya perusahaan kaus oblong, supaya produknya laku, apakah pimpinan perusahaan itu harus diduduki orang-orang baru, atau orang -orang lama disuntik semangat baru sehingga dia ikut memikirkan warna dan corak baju yang baru itu? Demikian juga bangsa Indonesia, agar dapat mencapai titik kesimbangan antara pembangunan politik dan ekonomi, apakah perlu perubahan kepemimpinan nasional, atau tetap status quo tapi dengan semangat baru? Lalu, bagaimana *Pak Bambang* menempatkan diri sebagai jendral, kalau misalnya,di masa depan ada masyarakat yang mendesak pemerintah merubah status quo?

***Kodiat* (Lembaga Studi Pariwisata)**

Semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga tidak perlu ditingkatkan lagi. Tapi yang terjadi, justru harkat dan martabat itu seringkali direndahkan untuk berbagai kepentingan. Secara tidak sadar, istilah peningkatan harkat dan martabat manusia itu merupakan cernin kesombongan intelektual terdidik yang merasa lebih tinggi martabatnya dari masyarakat awam.

Masyarakat sendiri sebenarnya sudah mandiri. Tetapi sering dibuat tidak mandiri, karena motivasi-motivasi tadi. Contohnya, saat liburan anak sekolah beberapa waktu lalu di Jakarta. Saat ada razia KTP dan pemeriksaan surat jalan, kok kita sepertinya mengganggap apriori masyarakat sebagai penjahat, sehingga harus punya surat jalan, surat berkelakuan baik, dan lain sebagainya. Ini cerminan suatu pola pikir paternalistik feodal.

Tadi Pak Bambang mengatakan karena berprofesi ABRI, berbaju hijau lalu kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Memang dalam dalam berpartisipasi politik, baju hijau sebaiknya jangan dipakai. Partisipasi politik haruslah didasarkan pada suatu kewibawaan

intelektual, kultural, keadilan dan kesetaraan, bukan berdasarkan kekuatan fisik maupun massa. Atas dasar itu ada beberapa kriteria yang bisa digunakan dalam pembangunan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Pembangunan harus didasarkan hasil musyawarah dan mufakat masyarakat, terutama penduduk setempat.
- Hasil-hasil pembangunan harus ditujukan pada kesejahteraan masyarakat (yang meliputi materi, spiritual, kultural, dan intelektual), khususnya penduduk setempat.
- Pembangunan harus didasarkan pada prinsip-prinsip ideologi, dan harus peka pada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan setempat.

***Hidayat* (Generasi muda)**

Sejak kita merdeka pembangunan banyak didukung oleh sumber daya alam yang melimpah ruah dan keberlimpahan tenaga kerja yang "murah meriah". Namun, sekarang hal itu semakin berkurang. Bahkan, menurut pengamat ekonomi, tahun 2035 mendatang negara kita akan jadi pengimpor energi. Jadi dulu kita membiayai pembangunan dengan ekspor energi, justru sekarang kita mulai membuang uang untuk mengimport energi.

Kalau dulu kita mempunyai keunggulan sumber pekerja yang murah, sekarang muncul negara-negara yang baru saja keluar dari konflik internal, seperti: Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh. Negara-negara itu menawarkan pekerja yang lebih murah. Akibatnya, terjadi pengalihan investasi asing ke negara-negara tersebut. Itu jelas merupakan tantangan bagi kita. Belum lagi setumpuk isu-isu globalisasi seperti: human rights, demokratisasi, hak cipta atas hasil karya intelektual, dan lain sebagainya. Hal ini juga merupakan tantangan yang cukup berat, karena seringkali perdagangan internasional dikaitkan dengan isu-isu tersebut. Itu sekedar latar

belakang pemikiran dari saya.

Nah, kepada *Pak Manuwoto*, saya ingin menanggapi soal pemberdayaan. Masalah pemberdayaan tidak hanya mengena pada pelaku-pelaku elit pembangunan, konglomerat atau pengusaha, tetapi seluruh masyarakat. Dalam kaitan ini, saya ingin menyoroti soal "otonomi daerah". Menurut saya, lama kelamaan kita menunjukkan ketidakmampuan membangun dengan gaya sentralistik. Gaya pembangunan yang sentralistik cukup efektif, tetapi sekarang kelihatannya tidak menumbuhkan peran serta masyarakat, bahkan peran serta pemerintah lokal juga tidak tertumbuhkan. Seringkali pemahaman antara walikota, gubernur dan kantor-kantor pusat ada gap yang luar biasa jauhnya. Padahal di negara-negara tertentu desentralisasi— misalnya, dalam pengambilan keputusan— sering dilakukan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Bila gaya kita masih sentralistik, mungkin akan menghambat daya saing nasional kita dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Karena tidak mungkin semua orang-orang pusat bisa mengatasi masalah-masalah di daerah dan tidak mungkin orang pusat mengerti pembangunan daerah. Yang mengerti adalah orang-orang daerah sendiri, dan yang tahu terapinya adalah mereka sendiri.

Dalam rangka itu, saya ingin bertanya kepada Pak Bambang: bagaimana Anda melihat masalah otonomi daerah, terutama dalam konteks konsep integrasi nasional ? Mana yang paling besar kontribusinya bagi stabilitas nasional, pendekatan keamanan dan pendekatan kesehjatreraan? Kalau 30 tahun lalu mungkin kontribusi pendekatan keamanan 80 persen, dan kesejahteraan 20 persen. Tetapi saat ini mestinya telah berubah, karena kesadaran politik masyarakat makin tinggi. Kalau tidak, akan menjadi berbahaya. Semua pengamat, bahkan penyelenggara negara, menyatakan bahwa kerusuhan sosial

yang banyak terjadi belakangan ini disebabkan tajamnya kesenjangan sosial di masyarakat.

***Emmy Hafild* (WALHI)**

Dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa tanggapan. Yang pertama soal keberanian rakyat. Sebenarnya rakyat itu berani-berani. Hanya saja situasilah yang membuat mereka tidak berani. Sebab, keranian rakyat itu seringkali distigmatisasi, dalam bentuk di cap PKI, subversi, ditunggangi, bahkan sampai dipukulin atau masuk penjara. Selanjutnya, mengenai program pemberdayaan masyarakat Indonesia yang tertinggal. Untuk itu saya ingin memberikan contoh tentang orang dayak. Masyarakat dayak dari dulu sudah mandiri, malah dapat mengirim anaknya sekolah. Tapi sekarang, justru dengan adanya pembangunan, hak-hak mereka diambil. Misalnya, sejak ada HPH mereka tidak berhak lagi ikut dalam perdagangan kayu. Rotan-rotan mereka juga diambil, lalu perdagangannya dimonopoli oleh asosiasi, sehingga mereka tidak bisa pula mereka berdagang rotan. Ada yang bertahan dengan sarang burung, tapi itu juga diambil dan dimonopoli. Segala macam diatur. Jadi, sekali lagi, *sebenarnya rakyat sudah cukup mandiri, tinggal diangkat sedikit lagi, dibantu dengan informasi pasar*. Tetapi sekarang terjadi, adalah pengambil-alihan hak-hak sumber daya alam oleh negara dan kelompok elit ekonomi, atas nama pembangunan.

Tadi Pak Bambang membandingkan proses pembangunan Indonesia dengan Inggris dan Amerika. Hal itu tidak dapat dibandingkan. Karena kedua negara itu menginvest sendiri tehnolog dan pengetahuan mereka. Sebaiknya kita membandingkan dengan Korea Selatan atau Taiwan. Kedua negara itu, melakukan pembangunan ekonomi yang diikuti dengan demokratisasi politik. Korea Selatan, misalnya, telah melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan

pembangunan, seperti korupsi. Jadi, kita harus belajar dari negara-negara Asia tersebut.

JAWABAN Pembicara

MANUWOTO:

Saya sependapat bahwa 75 persen masyarakat kita yang berada di desa, perlu mendapat perhatian lebih besar. Masalahnya, pengelolaan peran serta yang sebaik-baiknya itu belum dapat ditemukan. Selama ini pengelolaan peran serta itu terutama dilakukan lewat organisasi masyarakat. Tapi, bukti empiris menunjukkan di berbagai tempat pendekatan itu kurang berhasil. Karena itu, kita harus punya kemauan dan program yang jelas. Pada tingkat kebijaksanaan sebenarnya sudah ada, hanya saja ditingkat operasional banyak sekali devisiasi dan distorsi, sehingga menyebabkan sikap pasrah dan selalu menunggu intruksi dari yang (jabatannya) lebih tinggi. Dalam rangka itu, saya ingin megusulkan kita mencatat berbagai contoh pengelolaan peran serta yang berhasil dan yang gagal. Catatan itu dapat kita pelajari, lalu dirumuskan pendekatan yang paling tepat.

Mengenai pertanyaan Saudara Edy Siswantio tentang ambang batas pemberdayaan atau kepedulian, sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan semuanya sudah ada. Hanya memang belum sesuai dengan perkembangan atau dinamika pembangunan yang terjadi. Tapi, kalau memang mau diubah ambang batas itu harus kita bahas bersama lagi. Kalau memang tidak relevan atau tidak cocok lagi, kita harus mempersiapkan rumusan yang sesuai dan mampu mengantisipasi masa depan. Anggaran untuk pemberdayaan secara eksak memang sangat sulit disebutkan. Tapi, itu dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan kesehatan, pemerintah daerah, dan sebagainya. Secara tidak langsung, anggaran-anggaran

tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan. Yang penting, perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan dan efektifitasnya pada tingkatan-tingkatan yang lebih oprasional di bawah.

Mengenai pertanyaan soal stabilitas nasional, saya ingin melihatnya dari sisi ekonomi. Untuk mempertahankan stabilitas nasional, menurut saya, kita harus menjaga pertumbuhan makro ekonomi seperti yang kita alami sekarang. Tapi di sisi lain, kita harus bisa meningkatkan kecerdasan pengetahuan dan kesejahteraan, misalnya dalam bentuk pemberantasan buta huruf dan menghapus kemiskinan. Sebab hal-hal itulah yang menjadi sendi-sendi stabilitas nasional. Pemerintah sendiri memprogramkan pada repelita VII kemiskinan harus hilang, itu sasarannya secara sektoral maupun mikro.

Saya sependapat dengan Pak Kodiat, dan tidak melihat adanya perbedaan pendapat antara makalah saya dengan tanggapannya. Dalam hal ini saya hanya melihat faktanya. Harkat dan martabat manusia sudah sama. Begitu pula soal kemandirian masyarakat, sebetulnya, sudah mandiri. Tetapi, niat kita seringkali tidak membuat mandiri. Sebab, kita berniat berdasarkan pada pengamatan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri masyarakat luas, dan karena itu ada bagian-bagian masyarakat yang perlu diperhatikan. Ternyata, tak hanya dikalangan masyarakat bawah, bahkan di kalangan-kalangan atas juga ada yang perlu diberdayakan secara fisik, material dan intelektual. Kita-kita sendiri harus berani melakukan perbaikan sikap dan perilaku, jika memang tak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Memang sulit, karena kita selalu ingin bersikap *nothing to loose*.

Mengenai program IDT, harus diakui belum semuanya merupakan pemberdayaan, karena ada yang berhasil, ada pula yang tidak. Maksud semula adalah pemberdayaan. Bila kenyataannya di lapangan belum

sampai, itu mungkin perlu kita perbaiki. Salah satu upaya bagaimana membuka akses yang lebih besar terhadap berbagai peluang bagi masyarakat. Mungkin di banyak hal sering kita tidak sabar , tetapi itulah yang menjadi tantangan kita. Bagaimanapun, Indonesia merupakan negara yang besar, tidak seperti Brunei atau Malaysia.

BAMBANG S. YUDHOYONO

Saya telah 18 tahun menjadi bagian dari ABRI Masuk Desa. Selama ini saya tak merasa ada kekikukan dengan masyarakat. Karena dari waktu ke waktu selalu kita buat seefektif benar. Meski begitu, saya akan berusaha mencari sinyalemen kekikukan Bu Rostien tadi. Yang jelas, pada intinya kita tidak ingin ada jarak antara ABRI dengan rakyat. Kita juga tidak ingin membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan rakyat. Sesungguhnya semangat konsep kemanungglar ABRI itu adalah memainkan peranan secara seimbang: di satu sisi ABRI sebagai bagian dari pemerintah atau supra struktur, di sisi lain ABRI sebagai dinamisator infra struktur politik. Kedua peran itu kita laksanakan secara proporsioanal dan kontekstual. Inilah yang ingin kita capai.

Menjawab pertanyaan saudara Edy Siswanto, mengenai apakah di masa depan tidak perlu penyegaran-penyegaran? Sebenarnya konsep kita dalam membangun bangsa, antara lain, paradigma selaras, serasi dan seimbang. Artinya, tidak ada satu bidang dibangun, dan bidang lain diterlantarkan. Kalau kita sepakat di GBHN ada 7 bidang garapan, maka haruslah dibangun secara selaras, serasi, dan seimbang. Bahwa kemudian ada prioritas, itu benar. Prioritas itu artinya, kalau hal itu tidak ditangani segera, maka kita akan gagal menciptakan kondisi untuk pijakan pembangunan bidang lain. Jadi, prioritas atau tahapan harus ada, mana yang lebih dulu dan mana yang belakang.

Dalam kaitan soal penyegaran atau pergantian pimpinan nasional, sebenarnya kepemimpinan nasional (*national leardership*)— baik Presiden, pimpinan MPR/ DPR, dan pimpinan pemerintah daerah— memimpin bangsa selama jangka waktu tertentu, yaitu 5 tahun. Hal itu sudah menjadi kesepakatan kita, sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Jadi, masalahnya bukan diganti atau tidak diganti. Yang penting lima tahun itu kita harus pahami: negara kita akan kemana, visi kita seperti apa? Karena disitulah media kebangsaan untuk memilih putra-putra terbaik bangsa— kapasitasnya, integrasinya, dan dedikasinya. Kita juga harus disiplin dalam berkonstitusi dan kehidupan berkebangsaan.

Kemudian Pak Edy bertanya, bila suatu saat pemerintah status quo kemudian rakyat menginginkan perubahan bagaimana sikap saya? Bila kita berdialog dan bekerjasama, tidak akan ada saat-saat itu. Yang jelas, saya akan bekerja sebagai bagian pemerintah sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Pada forum CSIS beberapa waktu lalu, saya mengatakan bahwa tidak ada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sistim politik di negeri ini salah. Oleh karenanya, saya selalu menolak apabila ada ide reformasi atau perombakan total tatanan politik. Ibaratnya, apabila ada genteng rumah yang bocor, maka yang perlu diperbaiki adalah gentengnya, bukan pondasi atau tiang-tiangnya yang diganti. Bila kita sepakat komunikasi politik di intensifkan, mari kita intensifkan. Mari saluran-saluran kita buka, partisipasi kita tingkatkan, tapi jangan sampai ada reformasi. Ada orang bijak mengatakan bahwa hal paling berbahaya bagi suatu pemerintahan adalah reformasi. Hal ini menunjukkan memang tidak boleh adanya reformasi, karena dalam pembangunan politik, yang namanya perbaikan, penyempurnaan, atau pembaharuan itu sudah *built in*. Semua ini adalah tanggung jawab kita untuk meningkatkan dan memantapkan.

Mengenai tanggapan Pak Kodiat, saya ingin menegaskan bahwa ABRI selalu menggunakan cara sesuai konstitusi dalam ikut berkiprah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ABRI tidak pernah menggunakan kekuatan. Tidak ada tercatat dalam sejarah di negeri ini ABRI mem-perjuangkan kepentingan sendiri dengan cara militer atau cara kekerasan. Untuk membangun tentara modern di tanah air yang luas ini, kita membutuhkan dana besar. Anggaran hankam yang wajar adalah 3 persen sampai 5 persen dari anggaran belanja negara. Tapi anggaran hankam kita cuma 1,7 persen dari GNP. Itu artinya kami tidak egois, karena kami mengerti ada prioritas-prioritas yang lebih penting untuk pembangunan bangsa.

Unjuk rasa tentu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh menyentuh tertib sosial atau stabilitas nasional. Harus dipahami bahwa batas itu juga bersifat kondisional, tidak bisa dikasih matriks. Karena itu sangat bergantung pada ruang dan waktu. Situasi di daerah belum tentu sama di Jakarta. Juga tahun berapa saat-saat itu terjadi. Jadi, sekali lagi, menurut saya situasinya adalah konstitusional dan kondisional, meskipun harus ada patokan umum yang kita bangun. Hal itu merupakan konsensus atau kesepakatan. Sikap ABRI sendiri sekarang ini TUT WURI HANDAYANI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, ada saat tertentu kita ditengah, ada saat tertentu didepan, dan ada waktu kita ada dibelakang. Nah, melihat kecenderungan realitas saat ini, maka lebih tepat kiranya falsafah peran sosial politik ABRI disemangati TUT WURI HANDAYANI.

Saya melihat ada mis-interpretation (salah penafsiran) dari apa yang saya kemukakan. Yang pertama ingin saya tanggapi adalah hak asasi, hak sipil, dan hak politik. Sebenarnya UUD 1945 sudah cukup jelas menerangkan hal ini, dalam artian masih diatur dengan undang-undang yang telah kita pahami bersama. Tadi ada penanya yang mengungkapkan bahwa tidak percaya akan culture relativition, artinya

hak-hak asasi itu bersifat universal. Tapi, menurut saya, di dunia ini pasti ada perbedaan nilai sosial masyarakat Asia dengan masyarakat Barat. Misalnya, yang saya pahami. menyangkut soal hirarki, harmoni, dan konsensus. Konsep-konsep ini dihargai tinggi sekali oleh bangsa-bangsa Asia, tapi dinilai rendah di masyarakat Amerika dan Barat. Sebaliknya, konsep liberty (kebebasan) dihargai tinggi sekali oleh bangsa barat, tetapi dinilai rendah oleh bangsa Asia. Itu merupakan akar budaya yang disebabkan karena histori dan kondisi-kondisi natural di tiap negara. Itulah sebetulnya yang kita lihat sebagai cultural relativition. Bila dilihat perubahan pasal-pasal International Declaration of Human Right dari tahun ke tahun kelihatan, yang dulunya hak politik dan hak sipil, mulai masuk hak ekonomi, dan hak pembangunan. Tapi, untuk membahas ini mungkin perlu didiskusikan lebih jauh di masa depan untuk menyatukan pandangan, setidak-tidaknya membangun suatu wilayah kesepakatan.

Terakhir, saya ingin menanggapi pertanyaan saudara Emmi. Begini, saya tidak mengatakan bahwa sipil belum kuat, dan ABRI yang kuat. Semua kita bangun bersama-sama. Pembangunan adalah sebuah proses dan memerlukan konsep. Semua pihak adalah kontributor, termasuk LSM. Civil society merupakan bagian dari itu semua. Adapun maksud saya membandingkan dengan Inggris, Jepang dan Amerika yang lebih stabil, sebenarnya justru ingine mengatakan bahwa belum tentu sistim yang ada pada mereka kita ambil untuk dapat diterapkan disini. Saya sependapat bahwa kita memiliki model, sistem tahapan tersendiri. Karena itu, saya setuju dengan pendapat bahwa kita harus banyak belajar dari masyarakat dan bangsa-bangsa lain, dari waktu ke waktu. Dengan begitu, kita berharap masa depan bangsa Indonesia bisa lebih baik dari yang sekarang ini.

Pertanyaan Termin Kedua

Wardah Hafidz **(Aktifis Perempuan)**

Pertama-tama saya ingin menanggapi Pak Manuwoto. Seperti dikatakan Pak Manuwoto bahwa *pemberdayaan* itu mencakup peningkatan kebutuhan mempunyai kesadaran tentang sistem nilai dan norma, sosial politik, serta budaya— yang dapat berubah dan bisa diubah. Bila massa tidak mempunyai kesadaran itu, maka massa akan jadi mati, dan hanya berputar pada nilai-nilai yang dilestarikan dan dipertahankan. Bila hal ini terjadi, maka kemandekan yang terjadi dan itu pasti tidak bisa mengarahkan massa pada partisipasi, melainkan mobilisasi seperti yang terjadi sekarang.

Jadi, hal paling mendasar yang diperlukan untuk pemberdayaan adalah:

- Perlu adanya kehendak politik dari semua pelaku pembangunan, terutama dari kekuatan-kekuatan dominan yang ada di massa. Karena bila hanya dengan mengubah prilaku secara pribadi tidak akan cukup atau memecahkan masalah.
- Keterbukaan informasi, karena informasi merupakan hal yang sangat dikontrol di negara ini. Bila kontrol ini dihilangkan, maka pemberdayaan ini akan bisa terjadi.
- Kebebasan berserikat yang merupakan wujud partisipasi bagi massa, sehingga mampu mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan kepentingannya. Tapi kesempatan berorganisasi selama 30 tahun pembangunan terasa terampas dan tidak dirasakan.

Kepada Pak Bambang, saya ingin menanyakan beberapa hal. Mengapa ABRI seakan-akan mempunyai peran yang menyeluruh dari memegang senjata sampai peran menciptakan dan menafsirkan simbol? Bila seluruh peran itu diambil apakah tidak akan terjadi

konflik?

Sumaryati Aryoso **(Peserta diskusi)**

Kita perlu memperjelas soal pemberdayaan dalam sistem. Sebab selama ini, menurut saya kurang jelas. Misalnya, ada pendidikan wajib belajar, tapi anak-anak tidak bisa sekolah. Karena itu, saya mengusulkan agar penggalangan dan untuk kaum miskin, seperti dari Kelompok Jimbaran, misalnya, tidak berbentuk charity (hadiah), tetapi dimasukkan dalam sistem pajak. Artinya pajak para konglomerat itu lebih diperbesar, sehingga negara punya kemampuan membiayai anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Demikian juga dengan bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, masyarakat makin berdaya dan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam human *development index*.

Pertanyaan kedua menyangkut makalah (Pak Manuwoto) pada halaman 9 tentang sikap dan perilaku itu harus dibagi antara masyarakat dan birokrat. Hal yang belum diungkapkan adalah tentang kepastian hukum. Sehingga pegawai negeri yang mau ngomong terbuka, misalnya, tidak takut dikeluarkan, atau anggota DPR tidak takut direcall, dan sebagainya. Kepastian hukum itu perlu ditegakkan

Tohap Simanungkalit **(SBSI)**

Ada yang mengganggu pikiran saya bila berangkat dari topik seperti ini. Saya khawatir kita terjebak pada suatu paradigma berpikir yang kurang tepat terhadap Civil Society.. Sebab, di negara ini peran serta masyarakat sangat marginal. Karena itu, mungkin kita harus mencari sesuatu paradigma yang tepat, sehingga dalam konsep Civil Society itu tidak ada sesuatu pihak yang merasa super power.

Kepada Pak Bambang, saya ingin bertanya: bagaimana sebetulnya institusi ABRI memandang Civil Society? Bagaimana teman dari

kalangan ABRI mengimplementasikan diri dalam konteks pendekatan Civil Society ?

Jawaban Termin Kedua:

BAPAK MANUWOTO:

Permasalahan pokok pada ketiga penanya tadi, sepertinya, pada tingkatan yang lebih bawah, atau pada tingkatan yang operasional. Jadi, bukan political willnya yang kurang, tetapi sikap dari pelaku-pelaku itu yang belum sebagaimana seharusnya. Bukan hanya pada masyarakatnya saja, tetapi juga kalangan yang harus mengemong, seperti birokrat atau aktivis LSM sendiri.

BAMBANG S. YUDHOYONO:

Dalam forum ini saya menangkap kesan adanya kekhawatiran ABRI akan hadir disemua bidang. Sesungguhnya hakekat pengabdian ABRI siap mengemban tugas disegala bidang kehidupan. Tapi, sebagaimana kita ketahui pada realitas yang berkembang, ABRI akan selektif untuk menugaskan putra-putra terbaiknya pada bidang-bidang tertentu. Hal itu merupakan hakekat semangat kekaryaan ABRI. Jadi, tidak pernah ada konsep ABRI dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menggunakan kekuatan "military machine". Hal itu harus kita pahami dan yakini.

Mengenai pandangan ABRI terhadap Civil Society, kami memahami bahwa Selama ini terdapat kesalahpahaman seolah-olah Civil Society itu lawannya Militer Society. Kami melihat bahwa ada kehendak dari masyarakat untuk ikut berkiprah dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Ini tentunya positif dan konstruktif. Itu benar-benar merupakan counterpart atau mitra

pemerintah, dengan spesifikasinya bidang-bidang yang digeluti. Yang penting, gerakan masyarakat itu menunjukkan citra tertib dan konstitusional. Kita memang menolak LSM tertentu, bila menabrak rambu-rambu partisipasi, dan menyentuh dasar-dasar Pancasila.

KESIMPULAN

- Bahwa dalam upaya pemberdayaan memang terjadi distorsi dan terjadi pada tingkat-tingkat pelaksanaan. Kemudian terdapat hal-hal yang tidak dapat dipatokkan secara pasti dalam pendekatan keamanan, karena sangat tergantung pada perkembangan konstitusional dan kondisional.
- Reformasi total tidak perlu. Perbaiki saja yang kurang baik, karena resiko terhadap adanya reformasi total sangat berat.
- Kita memang tidak perlu belajar dari negara lain, karena negara lain mempunyai sistem yang berbeda dengan negara kita. Namun belajar itu tetap perlu.

BAB II

Pembinaan LSM

Civil Society dan LSM Indonesia

Oleh: Rustam Ibrahim
(Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta).

Untuk keperluan dialog kita pada hari ini, saya diminta mengantarkan suatu topik yang diberi judul '*Civil Society dan LSM Indonesia*'. Untuk itu, saya merasa perlu terlebih dulu menjelaskan pemahaman saya tentang apa yang disebut dengan civil society atau masyarakat sipil. Karena sebagai konsep yang sudah sangat tua, definisi masyarakat sipil mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dan adakalanya bertentangan satu dengan yang lain tergantung pada penafsiran dan tradisi pemikiran tokoh-tokohnya.[1] Dalam makalah ini akan saya kemukakan secara singkat tradisi pemikiran *Hukum Alam, Hegel dan Adam Ferguson.*

Istilah masyarakat sipil atau *civil society* berasal dari bahasa latin, yaitu *societas civilis*. Civilis berarti "yang berhubungan dengan komunitas". Jadi masyarakat sipil kira-kira berarti "komunitas masyarakat." Bapak ilmu politik, Aristoteles, *civil society* digambarkan dengan *koinonia politike* (masyarakat politik), dan yang dimaksud dengan polis adalah "negara kota" (city state) di Yunani kuno. Jadi, arti dari *Koinonia Politike*, adalah suatu komunitas masyarakat yang

---

1. *Dewasa ini sekurang-kurangnya ada tiga terjemahan yang dipakai sebagai terjemahan masyarakat sipil, yaitu "masyarakat madani", "masyarakat warga" dan "masyarakat sipil".*

hidup bebas dan mandiri dalam mencukupi kebutuhan sendiri. Dalam konsep Aristoteles, *masyarakat sipil* itu identik dengan *masyarakat politik* (political society) dan negara (state).

1. Tradisi Hukum Alam

Thomas Hobbes dalam bukunya yang terkenal *'Leviathaan'* (1641) mengatakan bahwa masyarakat yang hidup di dalam situasi alamiah, sebelum adanya negara (masyarakat alamiah) berada dalam situasi kacau dan penuh konflik berupa "perang semua melawan semua". Untuk mengakhiri situasi perang ini masyarakat mengadakan perjanjian untuk menyerahkan dirinya kepada badan yang lebih tinggi yang disebut dengan negara. Sekali mandat ini diberikan, ia tidak dapat mencabut lagi dan negara yang tercipta adalah negara yang absolut. Negaralah yang dapat mengubah keadaan perang semua melawan semua, menjadi masyarakat yang damai dan teratur. Hal ini karena negara mempunyai kapasitas untuk bertindak secara baik dan adil. Keadaan masyarakat yang teratur, tentram, aman dan damai inilah yang disebut oleh Hobbes sebagai masyarakat sipil yang tidak lain identik dengan negara.

John Locke dalam*'Second treatises of Government'* (1690), menyatakan bahwa manusia didalam masyarakat alamiah adalah manusia yang merupakan *agent of god in the earth*. Pandangan **John Locke** ini, sangat berbeda dengan pandangan **Hobbes**, yang menyatakan bahwa manusia sudah memperoleh kebebasan yang sempurna sesuai dengan kemauan Sang Pencipta. Karena itu manusia didalam tatanan masyarakat alamiah sudah menikmati berbagai hak seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang diatur oleh Hukum Alam.

Untuk menjamin agar kehidupan mereka lebih nyaman, aman dan damai, maka dengan persetujuan bersama mereka menyatukan diri kedalam masyarakat sipil atau masyarakat politik, yang lalu menciptakan suatu lembaga pemerintahan yang disebut *Commonwealth*, dengan menyerahkan kekuasaan dan hak-hak yang meraka miliki. Akan tetapi apa yang dimiliki oleh pemerintah hanyalah apa yang diserahkan oleh masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-hak yang tidak mereka miliki. Jadi, kekuasaan pemerintah terbatas kepada apa yang diserahkan masyarakat, yang hanya dipergunakan untuk kebaikan umat manusia dengan melaksanakan hukum dan menegakkan keadilan untuk melindungi hak hidup, hak kebebasan dan hak milik, Jika pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap kehidupan dan kebahagiaan rakyatnya, maka rakyat dapat menjatuhkan negara dan mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat sipil. Dalam keadaan ini, negara berakhir tetapi masyarakat sipil tetap karena masih diatur oleh Hukum Alam yang bersifat kekal. Dalam pemikiran Jhon Locke, pengertian masyarakat sipil mulai memisahkan diri dengan negara.

Tentang fungsi negara yang terbatas semakin diperjelas oleh **Thomas Paine** dalam *'The of Right of Man'* (1791). Menurut Paine, negara tidak mungkin dari *Necessarry evil* sedangkan masyarakat sipil sebagai *unqualified good*. Legitimasi negara tidak lebih dari pendelegasian kekuasaan untuk keuntungan bersama masyarakat sipil, semakin mampu mereka mengatur masyarakat sipil, semakin mampu mengatur dirinya sendiri, semakin berkurangnya peranan pemerintah.[2]

---

2. *John Keane, Democracy and civil society, (London : Verso, 1988), hal. 49.*
3. *istilah "masyarakat warga" agaknya lebih sesuai sebagai terjemahan dari citizenship dari pada terjemahan civil society.*
4. *T.H. Marshall, "Citizenship and Social Class", dalam David Held et. al., States & Societes, (Oxford, UK.: Blackwell Publisher, 1983), hal. 249-250.*

2. Masyarakat Sipil sebagai "masyarakat warga"

Pada abad ke-19 konsep tentang masyarakat sipil mendapatkan penekanan lain dengan mulai tumbuhnya kapitalisme dan negara industri. Yaitu bagaimana nilai-nilai keanggotaan dan kebersamaan individu di dalam masyarakat sipil itu diwujudkan dalam kehidupan negara bangsa (nation-state) yang disebut dengan kewarganegaraan atau *citizenship* yang berasal dari bahasa Latin *civitas* atau "warga".[3] Pada masa itu, perjuangan untuk mendapatkan kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak; dan yang terpenting hak untuk mendirikan partai politik dan hak suara.

Citizenship sebagai perwujudan dari keanggotaan penuh warganegara di dalam komunitas negara terdiri dari tiga elemen. *Pertama*, elemen civil yakni hak-hak yang dibutuhkan bagi kebebasan individual, kebebasan orang per orang, seperti kebebasan berbicara, berpikir dan beramal (beragama), hak milik pribadi, hak untuk melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, hak akan keadilan berupa persamaan di depan hukum. *Kedua*, elemen politik yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kekuasaan politik, atau sebagai pemilih untuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat. *Ketiga*, elemen sosial terdiri dari hak untuk keamanan, kesejahteraan ekonomi, hak untuk memperoleh pendidikan, upah yang layak, pelayanan sosial dan sebagainya.[4]

---

5. *Dengan kehidupan etis dimaksudkan adalah kehidupan yang ada dalam ide, gagasan, bukan merupakan kehidupan nyata sehari-hari.*
6. *John Keane, op.cit., hal. 49.*

3. Tradisi Hegel

Konsep masyarakat sipil menurut **Hegel** adalah suatu kehidupan etis[5] yang berada di antara kehidupan domestik/rumah tangga/keluarga dan negara. Ke dalam masayarakat sipil itu termasuk kehidupan individual, sosial dan ekonomi yang diatur oleh Hukum Perdata. Jadi tidak berhubungan secara langsung dengan kehidupan politik/negara. Akan tetapi, interaksi di antara berbagai elemen masyarakat sipil itu tidaklah berlangsung secara harmonis dan rasa solidaritas, melainkan situasi pertentangan dan konflik karena setiap orang mengejar kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain.

Masyarakat sipil itu sendiri tidak mampu mengatasi kecendrungan fragmentasi dan konflik di antara mereka. Kecendrungan ini hanya dapat diatasi oleh kekuasaan negara. Negara secara efektif dapat mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat dan mempersatukan berbagai kepentingan individu kedalam kepentingan masyarakat yang universal. Dengan demikian negara kemudian mewakili kepentingan masyarakat sipil sebagai suatu kesatuan .

Di dalam konsep ini, Hegel tidak melihat larutnya pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil. Dalam pandangan Hegel, situasi ini tidak berarti bahwa masyarakat sipil tidak mempunyai ruang untuk kebebasan individu, karena yang diminta oleh negara terbatas kepada minimum yang diperlukan. *Pertama*, untuk meniadakan

---

7. *Istilah "masyarakat beradab", yaitu masyarakat madani diperkenalkan oleh kalangan ICMI. diambil dari kata-kata madinah sebagai pusat peradaban Islam di masa Rasullah dan Khulafa al Rasyidin. Akan tetapi dalam wacanan masyarakat madani tampaknya belum pernah dibicarakan dengan tuntas bagaimana seharusnya masyarakat madani dengan negara.*
8. *Noberto Bobbio, Democracy and Dictatorship : The nature and limits of Power, (Minneapolis : University of Minneasota Press 1989, hal. 37-38.*

ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat, dan *kedua*, untuk melindungi kepentingan penduduk yang universal, yang ditentukan oleh negara itu sendiri.

Alexis de Tocqueville, yang sangat terkenal dengan bukunya '*Democracy in America*' (1835-1840), menyatakan bahwa argumen yang membela negara atas nama kepentingan universal mengandung bahaya dalam bentuk tumbuhnya suatu despotisme negara yang baru. Negara yang memperoleh kekuasaan dari masyarakat sipil, justru mempunyai kecendrungan untuk semakin menguasai kehidupan masyarakat. *"Negara menjadi pengatur, pemeriksa, pendidik dan penghukum kehidupan masayarakat'* (The state becomes a regulator, inspector, educator and funisher of social life)[6], yang pada gilirannya akan merampok kebebasan dan persamaan warganegara. Menurut Tocqueville, kecendrungan ini harus dibatasi dengan menghambat ruang lingkup organisasi negara (by blockages in the sphere of state organisation). Ini dilakukan dengan cara menumbuhkan dan mengembang-kan organisasi-organisasi masyarakat sipil (civil associations) yang lebih banyak terlibat dengan kepentingan komunitas mereka yang beragam daripada soal-soal politik seperti pemilihan umum. Akan tetapi, apabila menyangkut kepentingan mereka sendiri, mereka mampu menegosiasikan kepentingan dengan negara untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bagi Alexis de Tocqueville, kekuasaan negara tanpa hambatan dari masyarakat akan selalu berbahaya dan karena itu tidak diharapkan.

---

9. *Jean L. Cohen dan Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, (Canridge, Massachusetts : The MIT Press, 1992), hal. Ix.*
10. *Adam B, Seligman, the Idea of Civil Society, (New York, N.Y. : The Free Press, 1992), hal. 5.*

4. Masyarakat Sipil sebagai "Masyarakat Beradab"

Adam Ferguson dalam bukunya '*Essay on the History of Civil Society*' (1767), melihat masyarakat sipil semata-mata sebagai tahap terakhir dalam perkembangan peradaban umat manusia. Dia menafsirkan pengertian civilis sebagai civilitas (peradaban). Karena itu, masyarakat sipil berarti "*masyarakat beradab*"[7] (civilized society). Sejarah umat manusia menunjukkan perkembangan dari kondisi biadab (savage condition), yang hidup dari berburuh dan tidak mempunyai hak milik dan negara; berlanjut kedalam kondisi barbar (barbaric condition) yang hidup dari pertanian yang sudah mempunyai hak milik, akan tetapi belum mempunyai negara; kemudian menjadi kondisi beradab (civilized condition), yang hidup dari perdagangan dan pertukangan/industri dan sudah mempunyai lembaga hak milik dan negara.[8]

Dengan berbagai definisi dan interpretasi diatas, kelihatan bahwa berbagai definisi masyarakat sipil itu, memang sulit untuk dirumuskan karena mengandung berbagai tafsiran. Akan tetapi apapun definisi dan interpretasi yang diberikan konsep masyarakat selalu dijelaskan dalam hubungannya dengan konsep pasangannya negara. Karena itu, akan dipaparkan pula beberapa definisi operasional yang lebih sederhana dan mudah dimengerti mengenai masyarakat sipil, dalam hubungannya dengan pengertian masyarakat politik dan negara.

---

11. *Alfred Stepan, Rethinking Military Politics : Brazil and Southern Cone, Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1988), hal. 3-4.*
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*
14. *Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World, (Boulder, San Fransisco:The Westview Press, Inc. 1993), hal. 157.*

Jean L. Cohen dan Andrew Arato di dalam bukunya Civil Society and political Theory merumuskan definisi kerja *masyarakat sipil* sebagai :

We understand civil society as a sphere of social interactions between economy and state, composed above all of the intimate sphere (especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social mevements, and forms of public communications. Modern civil society is created through self-constitution, and self mobilization.[9]

Kita memahami masyarakat sipil sebagai suatu ruang interaksi sosial (yang terletak) diantara ekonomi dan negara, terdiri dari, yang terpenting, adalah lingkungan kekerabatan (khususnya keluarga), lingkungan organisasi/asosiasi (khususnya asosiasi sukarela, seperti NGO), gerakan sosial, dan bentuk-bentuk komunikasi publik (televisi, radio, dan sebagainya). Masyarakat sipil moderen didirikan dengan konstitusi (AD/ART) sendiri, dan dijalankan sendiri (mandiri).

Sebagaimana pemikir-pemikir lainnya Arato membedakan antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (political society), seperti partai politik dan organisasi-organisasi politik lainnya dan parlemen serta masyarakat ekonomi (*economic society)*, organisasi produksi dan distribusi seperti PT. koperasi. firma, dan sebagainya.

Menurut **Adam B. Seligman**, masyarakat sipil adalah *'collective entity existing independently from the state"*[10]. (kesatuan kolektif/ kehidupan bersama yang hidup independen dari negara).

Alfred Stepan merumuskan masyarakat sipil sebagai:

"...the arena where manifold social movements (such as neighborhood associations, women's group, relegious groupings, and intellecual currents) and civil organizations from all classes (such

as lawyer, journalist, trade unions, and enterpreneurs) attempt to constitute themselves in an ensemble of arrangements so that they can express themselves and advance their interest.[11]

Dengan definisi diatas **Alfred Stepan** kira-kira memaksudkan masyarakat sipil sebagai arena dimana beraneka-ragam gerakan sosial (seperti perkumpulan bertetangga, kelompok-kelompok perempuan, pengelompok-kan berdasar agama, kaum intelektual dan organisasi profesional (seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh, pengusaha yang berupaya membangun diri mereka sendiri dalam suatu "paduan kegiatan" untuk dapat menyuarakan kepentingan mereka).

Dengam masyarakat politik (*political society*) dimaksudkannya:

Arena in witch polity specifically arrange itself for political contestation to gain control on public power and the state apparatus." [12]

Suatu arena dimana masyarakat politik secara khusus mempersiapkan diri dalam persaingan politik untuk mengendalikan kekuasaan publik dan aparatur negara.

Sedangkan dengan negara (*state*) dimaksudkan:

something more than government. It is the continuous administrative, legal,bureauctratic, and coercive system that attemps not only to manage the state apparatus but to structure relations between civil and public power and to structure many crucial relationship within civil and political so-ciety. [13]

sesuatu yang lebih dari sekedar "pemerintah". Ia mencakup sistem administratif, legal, birokrasi dan paksaan yang berusaha mengatur bukan alat perlengkapan negara tetapi juga mengatur hubungan antara kekuasaan publik dan sipil mengatur banyak hubungan-hubungan yang penting di dalam masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Menurut **Georg Sorensen**

Civil society is the realm of social relations not regulated by the state. It includes all non state institutions such as interest groups, associations, civilright group, and youth movements. [14]

Masyarakat sipil adalah dunia hubungan sosial yang tidak diatur oleh negara. Mencakup seluruh lembaga-lembaga non-negara seperti kelompok kepentingan, asosiasi/organisasi, kelompok-kelompok hak sipil, gerakan pemuda, dan sebagainya.

Dari berbagai uraian dan kutipan diatas, maka saya memahami konsep masyarakat sipil tersebut sebagai:

1. Adanya berbagai organisasi di dalam masyarakat (tidak termasuk keluarga, organisasi, ekonom dan partai politik) yang keberadaanya relatif otonom dari negara dalam arti mampu mengatur dirinya sendiri berdasarkan aturan-aturan yang dibuat sendiri dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau peraturan lainnya seperti *code of conduct* dan mampu menegakkan aturan-aturan tersebut dengan baik.
2. Organisasi/anggota-anggota organisasi ini diakui dan dilindungi hak-haknya, terutama hak-hak sipil dan politik.

Dengan pemahaman saya tentang masyarakat sipil sebagaimana dikemukakan di atas, maka saya ingin mengatakan bahwa di Indonesia belum terwujud apa yang disebut dengan masyarakat sipil atau civil society. Lantas, apa relevansi civil society dengan LSM Indonesia sebagaimana topik yang diminta INPI-Pact? Barangkali dengan jumlahnya yang sangat besar, tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan keberadaanya yang (sekurang-kurangya mencoba untuk) otonom dan independen dari campur-tangan negara, maka LSM dilihat mempunyai peran untuk membangun masyarakat sipil dan merupakan embryo dari masyarakat sipil.

5. Civil Society dan LSM Indonesia

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dengan aneka ragam kegiatannya sebagimana yang kita saksikan dewasa ini, sesungguhnya adalah "produk sampingan" dari Orde Baru, atau barangkali "anak yang tidak diinginkan". Meskipun keberadaannya diakui tetapi selalu dilihat sebagai organisasi yang selalu ingin berseberangan dengan pemerintah, tidak seiring-sejalan dengan program dan kemauan pemerintah. LSM seringkali dituduh sebagai menghambat program pembangunan, membuat onar, bermasalah. Sampai kepada tuduhan tidak nasionalis dan patriotis dan menjadi alat kepentingan asing. Karena itu LSM perlu selalu diawasi dan dikendalikan.

Berdasarkan kegiatan dan kepeduliannya, saya ingin membagi LSM ke dalam tiga generasi. LSM generasi pertama mulai muncul pada awal dasawarsa 1970-an, tatkala pemerintah Orde Baru memulai pembangunan nasional berencana. Pendekatan teknokratis memainkan peranan yang penting dimana birokrasi memegang peran yang dominan, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang sifatnya *top down*.

LSM hadir sebagai reaksi terhadap peningkatan birokratisasi dan etatisme pembangunan tersebut. Mereka yang menaruh perhatian kepada pendekatan pembangunan diluar kerangka negara dan merasakan pentingnya otonomi sektor swasta, berusaha mengembangkan prinsip-prinsip ini melaui LSM. Kalangan ini percaya bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi melalui kedermawanan semata, namun dibutuhkan bantuan yang sifatnya mendorong kaum miskin untuk mampu memanfaatkan sumber daya di sekitar mereka dan memecahkan masalah mereka secara mandiri. Pendekatan dan

strategi berkisar pada pengembangan kemampuan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan kemampuan kelompok. Oleh karena itu pendekatan ini disebut dengan pendekatan pengembangan masyarakat (community development). Kegiatannya terbatas pada upaya pembangunan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan yang miskin dan terabaikan dalam program pembangunan pemerintah dalam bentuk bantuan teknis serta dana dan memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. LSM ini didirikan oleh kaum aktivis dan intelektual yang dipengaruhi oleh teori-teori modernisasi dan pembangunan dan kerena itu pada dasarnya sama dengan ideologi pemerintah.

Diantara berbagai LSM generasi pertama antara lain dapat disebutkan LP3ES, Yayasan Bina Swadaya, Sekretariat Bina Desa, Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS), Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Studi Pembangunan (LSP), dan lain-lain. LSM ini bergerak dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat seperti kesehatan dan sanitasi, kependudukan dan keluarga berencana, teknologi tepat guna, perumahan murah industri kecil dan kerajinan rakyat, sektor informal, usaha bersama, perkreditan dan perkoperasian, perumahan murah, bantuan hukum dan sebagainya.

LSM generasi ke dua mulai bermunculan pada awal dasawarsa 1980-an terutama ditandai dengan fenomena Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Cikal bakal WALHI yaitu "kelompok sepuluh" (yang terdiri dari sepuluh LSM generasi pertama), yang sejalan dengan menculnya keprihatinan internasional dan nasional terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Mulai menaruh perhatian terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup terutama pencemaran oleh industri seperti tekstil, semen, pulp/kertas dan sebagainya. Kelompok

sepuluh ini memfasilitasi pertemuan pertama dari LSM yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, yang kemudian melahirkan suatu jaringan LSM lingkungan hidup dalam bentuk forum yang diberi nama WALHI. Disamping jaringan di dalam negeri LSM Indonesia juga membangun jaringan dengan NGO internasional yang terkenal dengan nama INGI (international NGO on Indonesia) yang dalam menghadapi berbagai tekanan pemerintah kemudian mengubah namanya menjadi INFID (International NGO Forum on Indonesian Development).

LSM-LSM ini baik secara sendiri atau bersama-sama, didalam dan diluar negeri aktif melakukan advokasi yang terutama berhubungan dengan dampak pembangunan seperti pencemaran lingkungan hidup, penggusuran tanah, pembabatan dan kerusakan hutan dan resettlement. LSM ini juga aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat seperti hak masyarakat adat, hak-hak kaum perempuan dan sebagainya.

Dasawarsa 1980-an ini ditandai pula dengan bermunculannya berbagai LSM baik yang bergerak dalam bidang pengembangan sosial ekonomi masyarakat maupun dalam bidang advokasi.

Seiring dengan semakin meningkatnya wacana demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara global pada dasawarsa1990-an di tanah air juga telah bermunculan beberapa LSM yang saya sebut sebagai generasi ke tiga, secara langsung mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan penegakkan demokrasi dan perlindungan HAM baik melalui studi, advokasi maupun penerbitan-penerbitan. Ke dalam LSM generasi ke tiga ini dapat dimasukkan antara lain Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (YAPUSHAM), CPSM, PIPHAM, LBH-APIK, Yayasan Pijar, Aliansi Juranalis Independen,

ISAI, bahkan berbagai aliansi seperti KIPP. Masa ini juga ditandai dengan berkembangnya penerbitan-penerbitan sebagai sumber informasi alternatif yang diterbitkan secara *underground* yang berisikan masalah demokratisasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia termasuk informasi melalui internet.

Pembagian LSM ke dalam tiga generasi ini, tidaklah dimaksudkan untuk membuat kotak-kotak diantara LSM, lagipula pembagian ini tidak bersifat ketat. Banyak LSM yang mempunyai kegiatan-kegiatan dalam pengem-bangan masayarakat juga melibatkan diri dalam wacana demokratisasi ini melalui pendidikan, kajian atau advokasi tentang demokrasi dan HAM. Demikian pula LSM yang bergerak dalam advokasi lingkungan, mempunyai kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat, dan juga dalam pelanggran hak-hak asasi manusia. Kelahiran KIPP dengan maksud untuk memantau pemilihan umum didukung oleh tokoh-tokoh LSM baik dari generasi pertama, kedua dan ketiga. Tentu saja tidak semua LSM dapat all-out dalam menyuarakan demokrasi dan perlindungan HAM, karena selain bertentangan dengan visi, misi dan mandat organisasi, juga mengalami hambatan-hambatan yang bersifat internal. Bagiamanakah peran LSM dalam mewujudkan masyarakat sipil?

Negara Orde Baru (NOB) biasa disebut sebagai negara korporatis, sangat mengendalikan kehidupan masyarakat. Hampir tidak ada aspek kehidupan bermasyarakat yang tidak di kontrol oleh negara, melalui apa yang disebut dengan politik regulasi (politic of regulation) melalui peraturan dan perizinan.

Sehubungan dengan diskusi ini maka peran LSM dalam semua kegiatannya perlu ditujukan ke dua arah: (1). Memperjuangkan otonomi dan independensi LSM sebagai ranah masyarakat sipil atau swasta dengan mengontrol atau menghambat ekspansi kekuasaan negara untuk

tidak menjarah kewilayah-wilayah yang menjadi dominan masyarakat sipil. (2). Memperjuangkan pemulihan dan perlindungan HAM. Khususnya hak-hak sipil dan politik sebagai perwujudan "warga negara" yang lengkap (citizenship).

1. Menegakkan Otonomi dan Independensi LSM

Dengan menegakkan otonomi dan independensi LSM dimaksudkan bahwa LSM adalah organisasi yang memperoleh pengakuan konstitusional dalam UUD'45 dan diatur oleh Hukum Perdata, karena itu mampu mengatur dirinya dan anggota-anggota sendiri sebagaimana yang diatur oleh AD/ART LSM bersangkutan. Karena itu tidak seharusnya negara ikut campur dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSM selama tidak melakukan perbuatan melawan hukum. LSM perlu selalu berupaya menolak intervensi negara dalam bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui perturan dan perizinan yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Karena apa yang dapat dilakukan oleh masayarakat sendiri mungkin tidak perlu dilakukan oleh negara.

2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia

Kehidupan masyarakat sipil hanya dapat diwujudkan apabila hak-hak dasar warga negara ditegakkan. Ini mencakup hak sipil, politik dan sosial. Oleh karena itu menjadi tugas LSM untuk dalam berbagai kesempatan memperjuangkan isu pemulihan dan perlindungan HAM. Hal-hal yang sangat fundamental seperti kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dengan lisan atau tulisan sebagiamana yang tercantum dalam pasal 28 UUD'45 perlu selalu

dikumandangkan dan diperjuangkan oleh LSM. Disamping itu upaya membangun dan mengembangkan kesadaran bermasyarakat akan hak-haknya harus selalu dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan LSM dalam bentuk civic education (pendidikan kewarganegaraan), melalui advokasi, penerbitan ataupun kegiatan pengembangan masyarakat.

3. Membangun masyarakat pluralis

Komponen masyarakat sipil itu bukan hanya LSM. Banyak organisasi lain yang tidak menyebutkan dirinya sebagai LSM tetapi merupakan apa yang disebut dengan "organisasi masyarakat sipil" (civil society organizations). Antara lain seperti organisasi kaum profesional, asosiasi pengusaha, kelompok diskusi, kaum intelektual dan universitas, pers, ormas, orsos, klub, perkumpulan hobby, paguyuban, kelompok arisan, kelompok pengajian, pesantren dan sebaginya. Sebagimana dikatakan mencakup seluruh moment "kehidupan sosial/bersama (diluar kegiatan ekonomi) yang terletak diantara kehidupan domestik (rumah tangga) dengan negara. Oleh karena itu menjadi strategi LSM untuk mendukung semua prakarsa masyarakat dalam membentuk perserikatan /perkumpulan/organisasi diantara anggota masyarakat sendiri selama itu didirikan secara sukarela, sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang pluralis. Sebaliknya LSM perlu menolak setiap usaha pendidikan organisasi-organisasi yang sekedar merupakan "kepanjangan negara" untuk mengendalikan masyarakat.

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa dalam dunia moderen yang real negara adalah sesuatu yang harus ada. Problematiknya, disatu pihak negara itu perlu dikontrol dari kecendrungan untuk selalu mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat, dipihak lain kita

tetap membutuhkan perlindungan negara untuk terciptanya keamanan, ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut hemat saya, negara dan masyarakat sipil adalah dua momen yang dibutuhkan. Yang terpenting bagaimana kita menyadari dan menerima konsep adanya pemisahan antara apa yang menjadi ranah negara dan apa yang menjadi ranah masyarakat sipil. Sehingga hubungan antara masyarakat sipil dan negara menjadi: "terpisah" tetapi "berdampingan", "berbeda" tetapi "saling tergantung". Keduanya merupakan bagian dari sistem sosial secara keseluruhan.***

HUBUNGAN LSM DENGAN PEMERINTAH

Oleh :
Soetoyo NK *

PENDAHULUAN

UMUM

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat, disingkat LSM, pertama kali diangkat secara formal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

Didalam undang-undang itu diberikan istilah yang jelas keberadaan LSM.Kemudian dalam perkembangannya LSM tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja melainkan mencakup bidang lain sesuai yang diminati.

Masing-masing LSM melakukan kegiatan bidang tertentu sesuai yang diminati, seperti antara lain bidang : hukum, sosial kemasyarakatan, pembangunan masyarakat desa, ekonomi, perbankan/perkreditan, koperasi, lingkungan hidup, penggunan obat terlarang dan lain sebagainya.

Menurut literatur barat, tiap negara mempunyai sebutan sendiri-sendiri untuk menamakan LSM ini, antara lain di India menggunakan sebutan Voluntary Agency (Volag), di Inggris dan beberapa negara Afrika menggunakan sebutan Non Profit Organization (NPO), di

* *(Direktur Jenderal Sosial Politik, Depdagri)*

Phillipina menggunakan sebutan Non Government Organization (NGO).

Penggunaan sebutan yang bermacam-macam itu didasari oleh karakter penekanan peran yang dikehendaki, dan tentu saja dipengaruhi oleh sistem kenegaran yang dianut. Oleh sebab itu sangat wajar apabila Indonesia mempunyai sebutan lain menggunakan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menamakan NGO dengan karakter penekanan pada sisi swadaya dan kebersamaan. Pertimbangan yang didukung pemakaian LSM tersebut antara lain :

- Istilah LSM sudah mempunyai pijakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.
- Kebersamaan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan adalah sejalan dengan sistem kenegaraan kita yang disemangati kekeluargaan.
- Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk berserikat yang diatur oleh undang-undang, serta mempunyai kewajiban yang sama dalam upaya mencapai cita-cita nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dengan latar belakang pengertian LSM yang demikian itu jalinan hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan LSM perlu diciptakan dan dipelihara dalam rangka bersama-sama memajukan masyarakat, bangsa dan negara melalui pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemberitahuan.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Menteri Sosial Nomor : 78 Tahun 1993 dan 39/Huk/1993
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Lembaga dan atau Badan Non Pemerintah dengan jajaran Departemen Dalam Negeri.

UPAYA PEMANTAPAN FUNGSI DAN PERAN LSM.

Keberadaan LSM mulai semarak pada tahun 70-an dan keberadaannya dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya LSM sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan nasional dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka hubungan bilateral antar negara.

Namun hasil-hasil pembangunan tersebut masih ada yang belum dinikmati oleh sebagian masyarakat yang kurang beruntung atau pada masyarakat akar rumput (grass roots) dan masyarakat marginal.

Keberadaan yang demikian itu menimbulkan kepedulian beberapa anggota masyarakat ingin meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung. Pada situasi demikian tumbuh dan berkembang LSM sebagai wujud dan wadah partisipasi masyarakat.

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat disingkat LSM pertama kali diangkat secara formal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangannya LSM tumbuh dan berkembang untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat, baik di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan, kehutanan, pertanian dan sebagainya, sehingga pada kurun waktu tersebut keberadaan LSM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sehubungan semakin meningkatnya hubungan bilateral antar negara, beberapa LSM mulai menerima dana bantuan luar negeri dan menjalin kerjasama antara dalam negeri dan LSM luar negeri. Melihat perkembangan dan pertumbuhan LSM yang sangat pesat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang beruntung (grass roots), maka Pemerintah ingin mengoptimalkan keberadaan LSM agar benar-benar dapat bermanfaat bagi upaya meningkatkan kualitas, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditujukan kepada semua Gubernur KDH TK I dan Bupati/Walikotamadya KDH TK II untuk melakukan menginventarisasi keberadaan LSM, melakukan pembinaan dan menciptakan iklim yang kondusif agar keberadaan dan kehadiran LSM sebagai mitra Pemerintah dapat mengembangkan diri serta melakukan kegiatan di bidang yang diminati.

Muatan INMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

- Inventarisasi.
- Melakukan pembinaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

INMENDAGRI ini tidak lain mengandung makna LSM sebagai mitra dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Pembinaan terhadap LSM dilakukan baik oleh Menteri Dalam

Negeri, Gubernur KDH TK I, Bupati/Walikotamadya KDH TK II sebagai instansi Pembina Umum, juga dilakukan oleh instansi tehnis sebagai Pembina Tehnis.

Pembinaan Umum yaitu pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berperan aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pencasila.

Pembinaan Tehnis yaitu pembinaan khusus sesuai dengan jenis dan bidang kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Melihat kenyataan bahwa keberadaan LSM yang mempunyai aneka ragam kegiatan di bidang Usaha Kesejateraan Sosial (UKS), maka perlu adanya pembinaan terpadu antara Departemen Dalam Negeri sebagai Pembina Umum dan Departemen Sosial sebagai Pembina Tehnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 58 Tahun 1984 tentang Pembinaan Organisasi Sosial, membentuk Dewan Nasional Indonesia untuk kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Sedangkan untuk tingkat Propinsi dibentuk badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dan untuk Tingkat kabupaten/Kotamadya dibentuk forum kegiatan kesejahteraan Sosial (FKKS).

Berdasarkan INMENDAGRI No. 5/1985, baik DNIKS, BKKKS, dan FKKS adalah Organsiasi Sosial yang bersifat Koordinatif.

Untuk melakukan pembinaan secara terpadu bagi LSM yang berkiprah di bidang usaha kesejahteraan Sosial (UKS), Organisasi Sosial yang bersifat Koordinatif.

Untuk melakukan pembinaan secara terpadu bagi LSM yang berkiprah di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), organisasi sosial yang bersifat operasional seperti yayasan panti asuhan, anak terlantar, panti-panti jompo, yayasan tempat penitipan anak, penyantunan anak terlantar baik didalam panti atau diluar panti, serta organisasi sosial yang bersifat Koordinatif seperti DNIKS, BKKKS, FKKS, maka telah dikeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan 39/ Huk/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan LSM.

Muatan Keputusan Bersama tersebut antara lain :

- Pengembangan dan mendayagunakan peranan Organisasi Sosial/ LSM.
- Pendataan dan Pemetaan potensi.
- Hubungan Organisasi Sosial/LSM UKS dengan instansi pembina baik Pembina Umum maupun Pembina Tehnis.
- Pengaturan Hak dan Kewajiban Organisasi Sosial/LSM.
- Pemantapan mekanisme koordinasi dan prosedur kerja.
- Pengaturan tugas dan tanggung jawab Departemen Sosial baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan misi, peran dan fungsi Organisasi Sosial/LSM telah dikeluarkan Petunjuk tehnis, yaitu :

- Penumbuh-kembangkan Organisasi Sosial Tingkat Desa/ Kelurahan.
- Pembinaan Organisasi Sosial/LSM, UKS mandiri.
- Koordinasi Tata Kerja Organisasi Sosial/LSM, UKS.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia diatas fungsi FKKS pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah TK II ditingkatkan bukan lagi sebagai Forum kegiatan Kesejahteraan Sosial tetapi sebagai

Koordinator Kegiatan kesejahteraan Sosial (KKKS).

Baik dalam INMENDAGRI No. 8/1990, maupun dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, yang berkenaan dengan kiprah LSM, Organisasi Sosial/LSM UKS yang melakukan kegiatan dan program-program di Kelurahan dan Desa agar berkoordinasi dengan LKML/LKMD.

Koordinasi dan konsultasi tersebut dimaksudkan agar program-program LSM, Organisasi Sosial/LSM UKS dapat melengkapi dan sejalan dengan program-program LKML/LKMD serta untuk menghindari tumpang tindih program-program antar LSM, antara Organisasi Sosial/LSM UKS dan antar LSM, Organisasi Sosial/LSM UKS dengan program-program LKML/LKMD.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu misi, fungsi dan peran LSM untuk ikut menyukseskan pembangunan nasional terutama dalam PJP II maka perlu adanya suatu kemitraan diantara pelaku pembangunan yakni Pemerintah, BUMN, BUMD, Koperasi, LSM dan Swasta.

Kemitraan yang hendak kita bangun adalah kemitraan dalam melaksanakan kegiatan dan program untuk mendukung beban pembangunan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan kemitraan dalam pengertian kesejajaran.

Setelah Pancasila diterima sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dirasakan telah

membawa perubahan yang cukup mendasar didalam kehidupan masyarakat yang tidak lagi membias, tetapi sudah bermuara pada satu arah pandang.

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN diamanatkan untuk meningkatkan pembangunan kehidupan politik diarahkan menumbuh-kembangkan peran, fungsi, kualitas dan kemandirian organisasi ke-masyarakatan dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kekhususannya atas dasar kesamaan bidang kegiatan profesi, fungsi serta agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar benar-benar berpegang pada Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta senantiasa mengarahkan kehidupan dan kegiatan organisasinya untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Oleh karena LSM merupakan salah satu komponen Lembaga Kemasyarakatan lainnya, maka pemerintah melakukan pembinaan untuk perlu adanya upaya meningkatkan misi, dan peran LSM, agar LSM meningkatkan kemampuan baik finansial, penalaran, organisasi/ lembaga, manajemen dan pelayanannya serta memepertajam program-programnya untuk ikut mensukseskan pembangunan nasional. Dengan kata lain LSM perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berpartisipasi pembangunan nasional.

UPAYA MEMBANGUN KEMITRAAN.

Upaya untuk membangun kemitraan yakni dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan kepada semua Gubernur KDH TK I dan Bupati/ Walikotamadya KDH TK II.

Makna yang terkandung dalam INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990

tersebut antara lain :

- Bahwa keberadaan LSM dirasakan sangat bermanfaat bagi upaya meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Karena itu LSM adalah mitra pemerintah dalam pembangunan nasional.
- Mengadakan forum komunikasi dan konsultasi secara berkala dan berlanjut guna menjalin kemitraan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi LSM dalam melaksanakan program.
- Melakukan pembinaan baik pembinaan umum maupun pembinaan teknis, agar LSM dapat berkiprah dalam pembangunan nasional.
- Kemitraan yang akan dibangun adalah kemitraan dalam mendukung beban pembangunan bukan kemitraan dalam pengertian kesejajaran.
- Adanya keterbukaan antara pemerintah dan LSM sehingga adanya saling asah, asuh dan asih.

Walaupun INMENDAGRI No. 8/1990 adalah instruksi kepada para Gubernur KDH TK I, Bupati/Walikotamadya KDH TK II, dan bukan kepada LSM, namun pemerintah mengharapkan kerjasama dan saling mendukung agar Inmendagri dapat berjalan efektif.

Karena Inmendagri merupakan niat baik pemerintah untuk dapat bermitra dan dapat bekerjasama dengan LSM.

Dengan memberitahukan keberadaan LSM kepada pemerintah, akan lebih mudah terjalinnya kemitraan dikedua belah pihak. Karena falsafah kita mengungkapkan bahwa tak kenal maka tak sayang dan tak sayang, maka tak cinta.

Memberitahukan keberadaan LSM tidak dimaksudkan untuk mendikte apalagi mencurigai LSM.

Untuk menciptakan iklim yang kondusif agar kemitraan berjalan

dengan serasi dan seimbang, maka diperlukan keterbukaan bagi kedua belah pihak.

LSM diharapkan memberitahukan program-programnya serta sumber dana yang diperoleh dari luar negeri, dan sebaliknya pemerintah memberikan dorongan agar LSM dapat melaksanakan program-programnya tanpa dicurigai atau didikte.

Jika mekanisme ini sama-sama ditempuh maka kemitraan akan berjalan secara profesional, karena kemitraan harus disertai dengan niat yang baik dan tulus.

Untuk apa kita bermitra jika berhadapan kita saling tersenyum, dan dibalik belakang mendiskriditkan pemerintah baik di forum Internasional maupun di dalam negeri.

Begitu juga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pembinaan umum maupun pembinaan tehnis dimaksudkan agar terciptanya iklim yang kondusif bagi LSM untuk bekiprah dalam pembangunan nasional.

Pembinaan diberikan dalam bentuk dorongan, bimbingan, dan pengayoman.

Dorongan dan bimbingan diberikan kepada LSM yang belum mampu untuk melaksanakan program-programnya karena keterbatasan, keterampilan, jangkauan pelayanan dan hambatan tehnis lainnya.

Apabila LSM telah mampu melaksanakan program-program pembangunan, maka fungsi pemerintah sebagai *Tut Wuri Handayani*.

Namun pengayoman tetap diberikan kepada semua LSM yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengayoman ini adalah fungsi yang sangat mendasar bagi keberadaan tiap organisasi. Namun kadangkala fungsi ini kurang

disadari oleh LSM, sehingga LSM selalu melihat fungsi pembinaan yang diberikan oleh pemerintah, dari sisi negatifnya saja seolah-olah pemerintah hendak mendikte LSM.

Begitu pula dalam kaitannya dengan kerjasama antara pemerintah dan LSM luar negeri. Departemen Dalam Negeri telah mempunyai perangkat hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Lembaga dan atau Badan Non Pemerintah Luar Negeri dengan jajaran Departemen Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan peluang yang besar kepada LSM luar negeri untuk ikut mensukseskan pembangunan nasional Indonesia guna meningkatkan kualitas, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

LSM luar negeri yang bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya diwajibkan mempunyai LSM dalam negeri sebagai mitra, karenanya LSM luar negeri tidak boleh melaksanakan sendiri program-programnya.

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN.

Dalam TAP MPR NO. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa *" Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional".*

Dalam Bab IV Pembangunan Lima Tahun ke Enam di Bidang Politik Dalam Negeri yang mengamanatkan, sebagai berikut :

- *Kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dikembangkan untuk memantapkan pertumbuhan Demokrasi Pancasila terutama melalui upaya agar makin berperan dan berfungsinya Organisasi kekuatan Sosial Politik dan Lembaga Perwakilan Rakyat khususnya di Daerah, termasuk Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.*
- *Dalam rangka pembangunan politik, kemampuan kualitas, dan kemandirian Organisasi Sosial Politik, Organanisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjalankan perannya secara mantap dan tatanan kehidupan politik, termasuk dalam pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta mampu melaksanakan pendidikan politik dalam rangka membentuk kader bangsa yang tangguh dan berkualitas.*
- *Pembangunan kehidupan politik juga diarahkan untuk menumbuh-kembangkan peran, fungsi, kualitas dan kemandirian Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kekhususannya atas dasr kesamaan bidang kegiatan, profesi, fungsi serta agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa agar benar-benar berpegang pada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta senantiasa mengarahkan kehidupan dan kegiatan organisasinya untuk kepentingan bangsa dan negara.*

Bahwa untuk mengoptimalkan pembinaan dan untuk

meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR NO. II/MPR/199 tentang GBHN, maka perlu menempatkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan lainnya (termasuk LSM) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat terayomi dalam berkiprah mensukseskan pembangunan nasional. Karena LSM merupakan potensi sebagai agen dan motor penggerak pembangunan.

Langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong agar LSM dapat berkiprah dalam pembangunan nasional.
- Menempatkan pembinaan LSM kedalam perangkat hukum tersebut diatas yakni INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990, Keputusan Bersama Mendagri dan Mensos, serta Peraturan Mendagri No. 1/1996, sehingga pembinaan yang dilakukan dan berkiprahnya LSM dalam pembangunan nasional mempunyai kerangka hukum yang jelas.
- Memberikan kesempatan kepada LSM dalam negeri dan LSM luar negeri untuk bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di daerah, guna mensukseskan pembangunan.

PENUTUP

Dalam uraian pokok-pokok pikiran kebijakan pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut diatas, jelaslah bahwa LSM adalah mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Selain itu keberadaan LSM sangat bermanfaat bagi upaya meningkatkan kualitas, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya LSM dalam berkiprah melaksanakan program-

programnya tetap berpijak pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional Garis-Garis Besar Haluan Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama LSM berkiprah pada ketiga landasan tersebut, LSM akan mendapatkan tempat di masyarakat.

Kemudian LSM diharapkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengembangkan tehnologi dan wawasan kebangsaan.

Pengembangan tehnologi akan memperkuat daya saing bangsa kita sehingga kita tidak menjadi mainan bahkan menjadi penonton.

Pengembangan wawasan kebangsaan akan menjadikan kita tidak kehilangan identitas diri sebagai bangsa ditengah era globalisasi.

Hubungan ABRI dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Oleh: Rudini *

Harus diakui bila komunikasi antara Pemerintah (termasuk ABRI) dan LSM masih kurang serasi. Untuk itu saya sangat menghargai setiap usaha untuk mengadakan dialog, bukan polemik apalagi konfrontasi, agar terjadi pengertian yang lebih baik antara komponen-komponen pembangunan. Sejak saya di Departemen Dalam Negeri, usaha-usaha seperti ini telah saya lakukan. Bukan saja bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya (confidence Building), tapi lebih dari itu untuk memperkuat barisan menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat.

Globalisasi dengan segala gejalanya, sering di luar perkiraan kita. Misalnya saja, krisis mata uang yang terjadi dewasa ini. Untuk menghadapi *'krisis'* itu, diperlukan optimalisasi dari peran seluruh masyarakat dalam segala upaya nasional, terutama dalam pembangunan nasional dengan mengaktualisasikan fungsi-fungsinya. Hal ini dilakukan agar tidak ada celah-celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan asing. Untuk meningkatkan peran masyarakat diperlukan komunikasi dialogis secara lebih sering dan lebih teratur antar komponen masyarakat. Setiap pihak dituntut lebih saling mengenali peran dan fungsi dari setiap bagian masyarakat kita, sehingga dapat memposisikan dirinya dalam upaya nasional kita.

Saya kira hampir setiap orang di republik ini sudah mengenal dan mengetahui peranan ABRI dan fungsi Hankam, karena erat kaitannya dengan pasal 30 tentang hak dan kewajiban bela negara, dimana

seluruh warga negara— termasuk LSM— terikat oleh pasal ini. Sebaliknya peran dan fungsi LSM yang aktivitasnya baru menonjol setelah perang dunia, masih kurang dikenali masyarakat luas. Untuk itu pada seminar ini kita berharap akan lebih banyak lagi mendengar tentang peran dan fungsi LSM terutama tentang bagaimana memposisikan peran dan fungsi LSM ini dalam pembangunan nasional kita yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan nasional kita.

Kita tidak perlu lagi berargumen tentang masalah hubungan yang tidak serasi antara pemerintah dan LSM di masa lalu. Yang penting adalah berbicara dalam perspektif bangsa Indonesia menghadapi masa depannya. Yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita semua berada dalam satu sistem negara Pancasila. Negara dalam pengertian sistem adalah suatu entitas yang holistik, dengan komponen-komponen lainnya dalam sistem itu, saling mendukung (sinergik), dan saling terkait (interrelated), dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan nasional. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah dan LSM untuk berseberangan paham, kecuali untuk orang yang merasa tidak lagi berada dalam sistem. Menurut pendapat saya, ketidakserasian hubungan pemerintah/ABRI dan LSM dimasa lalu disebabkan gangguan-gangguan komunikasi yang perlu dan pasti dapat dihilangkan. Salah satu cara memperbaiki komunikasi, adalah melalui pertemuan-pertemuan dialogis seperti yang kita lakukan hari ini.

Dalam konteks idealisme, memang kehadiran LSM dikaitkan dengan ide demokratisasi pembangunan: pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam rangka demokratisasi pembangunan tersebut, perlu diciptakan suatu kondisi untuk mempersubur partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran mengenal hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Selama ini memang ada yang mempertentangkan LSM dengan

pemerintah, mengikuti terjemahan LSM yang berasal dari NGO (Non Government Organization), yang konotasinya adalah lembaga non-pemerintah. Padahal sebenarnya LSM adalah lembaga swadaya masyarakat, yang lebih menekankan kepada upaya masayarakat yang swadaya yang dapat memberikan nilai tambah kepada upaya pemerintah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seperti telah diulas diatas, sebenarnya di negara Pancasila yang menganut asas kekeluargaan dan kebersamaan , prasangka timbal balik antara LSM dan pemerintah tidak perlu ada. Bahkan LSM pada umumnya sudah mandiri. Melalui berbagai fungsinya, mereka telah berhasil memberikan nilai lebih kepada masyarakat dalam mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang kuat (strong society) untuk mengimbangi pemerintah yang sudah kuat. Seperti diketahui, setiap bangsa yang berpikiran maju, menginginkan agar negaranya menjadi kuat secara politik maupun ekonomi. Dan itu hanya terjadi bila masayarakat dan pemerintahnya kuat. Maka dalam proses menuju negara kuat itulah terjadi *"check and balances"* yang dilakukan oleh sistem kontrol dari sitem itu sendiri, dalam rangka penyesuaian diri (self adjusment) yang juga menjadi salah satu sifat dan ciri sistem. Dalam proses itu jugalah, kesalahpaman sering terjadi, terutama bila sistem kontrol dipersepsikan berbeda-beda oleh masing-masing pihak sesuai dengan kepentingannya.

Peran dan fungsi LSM yang perlu diaktualisir dewasa ini, adalah menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama membicarakan, membahas dan mengupas segala problema kemasyarakatan, terutama masalah-masalah sosial, seperti: kemiskinan, keterbelakangan dan menghilangkan berbagai kesenjangan. Juga masalah-masalah lingkungan hidup, seperti: kebersihan, polusi, dan pelestarian sumber alam. Bukan saja terbatas pada pemikiran, yang lebih penting LSM

harus berada dibarisan paling depan dalam mengatasi masalah-masalah diatas terutama dalam memerangi penyakit-penyakit sosial yang semakin merebak dewasa ini.

Menatap masa depan yang sarat dengan tantangan dan rintangan, hendaknya LSM bukan sekedar giat untuk ikut-ikutan, melainkan giat secara aktif-kreatif. Partisipasinya bukan semata-mata hanya sekedar untuk kepentingan organisasi, melainkan harus ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan menempatkan kegiatannya diatas kepentingan kelompok dan golongan inilah yang justru merupakan salah satu indikator berfungsi dan berperannya LSM dalam pelaksanaan pembangunan. Lebih lagi apabila masalahnya menyangkut masa depan, berkenaan dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Disini LSM dapat memberikan banyak sumbangan baik yang bersifat konsepsional maupun operasional. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang memadai keadaaan zaman sekarang dan zaman-zaman selanjutnya, menjadi demikian penting untuk diperhatikan. Sebab siapapun yang akan tampil nanti, dituntut untuk betul-betul menguasasi peradaban modern yang diwarnai iptek.

Apabila kepada generasi yang akan datang, lembaga swadaya masyarakat dapat ikut serta membekali pelbagai segi dan aspek kemampuan, kesanggupan dan keunggulan. Maka sosok LSM yang demikian itulah yang benar-benar didambakan oleh masyarakat. Swadayanya lembaga bukan saja melekat pada tubuh organisasi, tetapi juga hendaknya dapat ditularkan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat masa depan yang lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada petuah dan pengarahan orang lain.

Untuk menjaga agar LSM lebih berkonotasi pada upaya

masyarakat Indonesia, bukan sebagai NGO-murni yang berseberangan dengan pemerintah, maka sudah sewajarnya kegiatan LSM selain berlandaskan pada wawasan kemajuan, juga pada wawasan kebangsaan. Wawasan kemajuan saja tidak akan cukup, karena LSM demikian bisa saja lupa akan identitas negara RI yang merdeka. Kealpaan itu dapat memudarkan semangat untuk mencintai dan membela tanah air. Dalam keadaan demikian LSM akan menjadi beban, bahkan merepotkan masyarakat dan pemerintah. Dengan berlandaskan kedua wawasan itu, bangsa Indonesia akan mampu menjadi pelaku Iptek di masa datang, baik di forum nasional maupun internasional, dengan tetap memelihara identitasnya sendiri.

Dari uraian di atas, jelas kiranya bahwa LSM dan pemerintah/ ABRI berada dalam satu sistem negara Pancasila yang dituntut untuk bekerjasama dan saling mendukung. Apalagi bila kita berbicara tentang asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dianut oleh ajaran Pancasila, sehingga akan lebih memperkuat interelasi kedua komponen pembangunan tersebut.

Maka kita harapkan bahwa hubungan timbal baik LSM dan pemerintah dimasa datang akan berlangsung tanpa kecurigaan. Pemerintah mem-perlakukan LSM-LSM sebagai mitra kerja dalam pembangunan nasional untuk memacu partisipasi masyarakat sebagai upaya demokratisasi, sebaliknya LSM tidak harus apriori terhadap upaya-upaya pemerintah yang memang paling bertangung jawab dalam pembangunan nasional.

Pemerintah harus selalu menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi peningkatan peran LSM-LSM tersebut, tanpa adanya kecurigaan. Dipihak lain, LSM-LSM harus benar-benar semakin mandiri, dalam pengertian memperkuat dirinya sendiri, baik dari segi organisasi, manajemen maupun kemampuan dananya. Bukan menjadi

rahasia lagi, bahwa LSM-LSM dalam banyak hal, terutama dalam melaksanakan fungsi kemanusiaan (humaniter), membuka akses kejaringan internasional. Hal ini tidak akan menjadi masalah sepanjang LSM yang bersangkutan tetap mengakar kepada rakyat sendiri (grasssroot), dan mengarahkan segala upayanya demi pengabdian kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Bila prinsip tersebut dipegang secara konsisten, maka kecurigaan terhadap adanya kepentingan asing di LSM dapat dihapus.

Sebagai penutup, saya mengharapkan agar LSM dapat selalu mengadakan seleksi dan klasifikasi, sehingga predikat LSM sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan potensi masyarakat, menjadi lebih tangguh dan tegar, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk keperluan tersebut sangatlah penting untuk menjalin komunikasi timbal balik dengan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah melalui forum-forum yang tidak bersifat struktural dan kaku, melainkan luwes dan diselaraskan dengan kebutuhan. Dalam suasana komunikasi seperti itu pemerintah dapat memberikan informasi tentang program-programnya dalam rangka kebutuhan pengembangan masyarakat setempat, dan LSM sendiri dapat menyampaikan gagasan dan karya yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai wujud partisipasinya dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian sumbangsih LSM akan sangat dirasakan oleh masyarakat, dengan itu pula LSM mendapatkan legitimasi dari rakyat.***

Diskusi Sesi II

Pembicara :
- Rustam Ibrahim: Civil Society dan LSM Indonesia
- Abdurahman (mewakili Dirjen Sosial Politik Depdagri): Hubungan LSM dengan Pemerintah
- Rudini (Ketua Umum LPSI): ABRI dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Moderator : Dr. Kastorius Sinaga

Pertanyaan Termin I

Rostien Ilyas **(Yayasan Nanda Dian Nusantara)**

Dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilapangan, kadang-kadang musuh utama yang ditemui justru adalah penjabaran dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Contohnya begini, keberhasilan suatu desa itu seringkali dikaitkan dengan kemenangan GOLKAR dalam pemilu. Akibat rakyat desa tidak perduli lagi dengan program-program pembangunan yang lain, dan hanya berpikir yang penting GOLKAR menang ! Nah, kalau GOLKAR menang mereka berharap daerahnya dapat penghargaan.

John Sani **(Direktorat Jenderal Sosial-Politik Depdagri)**

Sebagai agen atau motor pengembangan masyarakat, saya ingin bertanya, sampai sejauh mana langkah dan kebijakan rekan-rekan LSM dalam melaksanakan kemerdekaan berkumpul dan berserikat? Sebab, sepengatahuan saya soal ini diatur dengan undang-undang, sehingga tidak dipakai sebebas-bebasnya atas nama human right?

Sudaryatmo **(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)**

Pertanyaan ini masih berkaitan dengan sesi I. Dimana batas

toleransi yang bisa disepakati bersama, antara pemerintah dengan kalangan LSM, agar bentuk partisipasi politik tidak mengganggu tata tertib masyarakat? Menurut saya, suatu partisipasi masyarakat di suatu tempat dapat ditolelir di tingkat daerah. Tapi, dalam pelaksanaannya seringkali melibatkan aparat pemerintah, sehingga terjadi konflik antara LSM dengan pemerintah, yang kemudian menimbulkan rasa saling curiga.

Contohnya, ketika melakukan advokasi Stiker SEA-Games dan iuran televisi, YLKI dianggap tidak nasionalis. Padahal, YLKI hanya mempersoalkan tanggung jawab yuridis penarikan pungutan tersebut. Sebelumnya YLKI juga telah melakukan penelitian ke masyarakat.

Jawaban Termin I

ABDULRACHMAN: Kadang-kadang apa yang terjadi dilapangan memang tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Dalam pembangunan politik ini dibutuhkan tiga faktor: harus tetap menciptakan kewaspadaan nasional, terselenggaranya pemilu, dan terselenggaranya siklus kepemimpinan nasional. Sebetulnya, sebagian konsep kita bernegara berasal dari konsep barat, hanya saja disesuaikan dengan keadaan negara kita. Nah, adapun kasus-kasus yang ibu (Rostien) sebutkan tadi hanya lokal saja, tetapi tetap harus menjadi kewaspadaan kita.

Mengenai pertanyaan Pak Sudaryatmo, memang sulit untuk dibuat kriteria yang pas, karena kriteria itu akan terus berkembang. Untuk itulah harus ada komunikasi politik, seperti seminar ini, misalnya. Dengan begitu, barangkali kriteria yang pas dapat dirumuskan bersama-sama.

RUSTAM IBRAHIM: Saya ingin menanggapi pertanyaan Pak John Sani. Menurut saya, ini perbedaan cara pandang. Kalangan LSM berpendapat pengaturan dalam undang-undang itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu, bukan untuk meniadakannya. Dalam kaitan itu pula, LSM tidak setuju dengan paket UU Politik tahun 1985.

R U D I N I: Dalam proses pembangunan politik, banyak orang yang melupakan *'siapa yang melaksanakan demokrasi ?'* Mestinya YLKI jangan hanya menyalahkan, tapi juga harus menyadari pengumpulan dana ini diperlukan untuk kepentingan nasional. Nah, tinggal bagaimana caranya, harus yang mendidik rakyat dan mempunyai landasan hukum yang baik. Sebenarnya, institusi demokrasi telah ada dalam masyarakat, tapi implementasinya seringkali masih bertentangan dengan hati nurani kita. Misalnya, saat saya menjadi Mendagri, kalangan LSM mengharuskan ketua LMD dan LKMD bukan kepala desa. Lalu pemerintah setuju. Tetapi disaat musyawarah pemilihan, kurang lebih 100 persen rakyat tidak setuju. Mereka malah tetap minta LMD dan LKMD dipimpin kepala desa. Nah, ini kan berarti rakyat harus dididik lebih lanjut, untuk mampu mengerti apa itu demokrasi dan cara melaksnakannya.

Pertanyaan Termin II

Ricky Tafuama **(Wartawan Harian Kompas)**

Saya punya pengalaman lama bergelut dengan LSM di Bandung. Yang sering terjadi adalah friksi antara aktivis LSM/mahasiswa dengan pemerintah. Para aktivis LSM/mahasiswa selalu mendampingi rakyat, bila terjadi ketidakadilan menghadapi pemerintah. Tapi, yang terjadi di lapangan, banyak intel yang hanya lulusan SMP mereka

mencatat semua kejadian pendampingan tadi. Lalu melaporkan keatasannya— yang belum tentu tahu persis keadaan lapangan. Dari laporan tadi disimpulkanlah bahwa LSM terkooptasi dengan paham-paham komunis, massa tidak menginginkan apa-apa, hanya LSM-lah yang dianggap membuat masalah. Bila dalam tahap praktis itu saja masih demikian yang terjadi, bagaimana kita mau memperjuangkan civil society?

Sumaryati Aryoso **(Peserta)**

Tadi disampaikan (Pak Rudini) bahwa rakyat desa itu terkesan masih bodoh, seperti dalam contoh pertemuan LKMD dan LMD. Yang ingin saya ketahui, pertemuan tersebut siapa yang menghadiri? Karena saya kok tidak yakin rakyat desa itu masih bodoh. Kalau kita bicara demokrasi, maka rakyatlah yang berhak mengambil "keputusan". Dalam hal ini, sejauh mana kita siap, karena kita menuju era globalisasi. Sekarang ini saja informasi sudah sangat terbuka, jadi biarlah rakyat yang menentukan mana yang baik dan yang buruk. Mendidik rakyat tidak harus kita beritahu terus-menerus. Bila begitu terus, maka peran massa tidak optimal karena top down terus. Hal ini berkaitan dengan masalah transparansi/keterbukaan, yang pernah disebutkan Presiden Soeharto— dimana kita semua diharapkan terbuka. Tapi, bila kita lihat dari pernyataan wartawan Kompas tadi dikatakan dimana-mana ada *INTEL*, sehingga bila ingin bicara di penataran P4 saja takut-takut, jangan-jangan dicatat.

Hendardi **(Direktur Eksekutif PBHI)**

Saya melihat dari sesi pertama hingga terakhir, dialog yang terjadi bukanlah suatu kesetaraan dalam komunikasi politik, tapi sebaliknya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sesungguhnya cara pandang aparat negara terhadap LSM sendiri? Lalu, mengapa cara pandang pemerintah selalu menganggap rakyat itu bodoh?

Jawaban Termin II

RUDINI: Sebetulnya saya tidak pernah menyimpulkan bahwa rakyat itu bodoh. Yang saya bilang rakyat itu belum mengerti, tapi kita-kita ini atau pemerintah tidak pernah memberi pengertian. Misalnya, dalam suatu pertemuan nasional KUD— dimana saya hadir sebagai Mendagri— ada peserta yang bertanya: "Tolong pak, pengurus KUD kita diganti karena tidak benar." Padahal, menurut anggaran dasar, adalah hak anggota untuk mengangkat dan mencopot pengurus KUD. Lalu, saya jelaskan sebenarnya itu adalah hak anda, tidak usah minta tolong Mendagri. Baru mereka mengaerti, dan dilaksanakan dengan baik.

Sebenarnya, andaikata kita tidak buru-buru meratakan semua satuan masyarakat menjadi desa, mungkin pemerintahan yang demokratis di daerah-daerah itu berjalan lebih baik. Sebab, sebenarnya, di luar Jawa itu masyarakat sudah dikelompokkan menurut adat, dan peraturan adat itu lebih kuat. Di Sulawesi Utara, misalnya, ada peraturan adat yang berbunyi: "Mereka yang mengambil kayu dari pohon sekitar sumber air masyarakat, hukumannya berat". Di Bali juga demikian. Tapi, kenapa dulu dipaksakan menjadi desa semua? Oleh yang bekerja dibelakang meja di pusat, semua desa itu diberi anggaran membuat balai desa. Padahal masyarakat Aceh kalau musyawarah tidak di balai desa, tapi di suro-suro. Jadi balai desa tidak pernah dipakai. Itu kan membuang-buang uang saja, karena kesalahan mereka-mereka yang pintar-pintar yang merencanakan dibelakang meja.

Kemudian mengenai yang masalah yang dikemukakan Saudara Ricky tadi, memang itu masih terjadi di lapangan. Sebab petugas di lapangan itu tugasnya memang mencatat apa adanya, dan tidak

menganalisa situasi. Yang menganalisa adalah staf di markas Kodim, Korem, atau Kodam. Petugas lapangan tugasnya hanya mecatat dan melaporkan saja. ABRI sudah mulai meningkatkan pendidikan sehingga pembagian tugas itu jelas. Jadi, kalau ada petugas KORAMIL yang bertindak keras di lapangan, itu karena petugas itu tidak mengerti.

Mengenai cara pandang aparat, saya kira akibat dari masa 1960-an. Jadi, kalau ada orang salah, langsung ditangkap dan digebukin, lalu disuruh mengaku PKI. Siapa yang tidak ngaku bila sudah digebukin? Tetapi tidak digali terlebih dahulu, siapa dia.

RUSTAM IBRAHIM: Manusia sudah sejak dulu hidup dalam kelompok. Kelompok itu sendiri ada yang baik ada yang tidak. Dan yang paling baik adalah apabila diantara kita yang mempunyai kemampuan mau membagikan kepada orang lain. Nah, dari pertanyaan dan tanggapan tadi ada ada dua hal yang saya perhatikan yaitu: masalah pembinaan dan arogansi. Pada dasarnya pembangunan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk itu, partisipasi masyarakat perlu di dorong betul-betul agar dapat berpartisipasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam Demokrasi Pancasila. Demikianlah titik tolaknya. Dari pembinaan pemerintah ada dua keinginan yang saya harapkan: Pertama, memotivasi agar masyarakat, organisasi masyarakat, atau infra struktur mampu melaksanakan fungsi pendidikan. Kedua, mendorong masyarakat berpartisipasi sesuai dengan fungsi kegiatan profesi. Kedua-duanya ini akan mendorong agar organisasi masyarakat mampu melaksanakan partisipasi.

Bab III

Penutup dan Kesimpulan

Penyajian materi oleh dua pembicara pada sesi I dan tiga pembicara padai sesi II, maupun motivasi dan semangat peserta di dalam mengamati materi pembicaraan tersebut, tampak sangat membanggakan hati. Semangat dan aktivitas yang sangat tinggi, diwujudkan melalui buah pikiran yang sangat kritis dan terbuka, meskipun ada sementara pihak yang hanya sekedar mengeluarkan unek-uneknya.

Tanggapan floor, ditinjau dari substansi materi, menunjukkan suatu ketajaman dalam analisis proses berpikir. Pandangan dan tanggapan perserta berpijak pada kehidupan aktual dan faktual, menyentuh langsung kehidupan masyarakat, meskipun disana sini masih terdapat perbedaan visi dan persepsi terhadap berbagai permasalahan. Tentu saja diharapkan dengan diskusi dalam suasana seminar diharapkan akan diperoleh titik temu dalam visi dan persepsi tersebut.

Hal-hal yang menonjol dari diskusi terhadap lima materi pokok yang dibawakan oleh para pembicara, antara lain:

a. Mencakup masalah otonomi daerah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah itu, ada daerah tingkat II yang telah menerima limpahan 22 permasalahan dari tingkat I. Tetapi, pada umumnya, daerah tingkat II belum siap menerima seluruh limpahan tersebut. Karena itu ada yang baru menerima 19 wewenang, bahkan ada yang baru 16.

b. Program IDT sudah cukup berhasil. Hal ini telah ditinjau dari 3 sampai 4 lokasi yang telah menerima dana IDT, ternyata mereka benar-benar memanfaatkan pancing untuk mengail ikan. Jadi lewat ibu-ibu PKK maupun aparat desa telah bisa ditingkatkan aspirasi " dari rakyat untuk rakyat ".

c. Soal suksesi kepemimpinan nasional telah dijelaskan oleh Bapak Bambang Yudoyuwono dalam suatu mekanisme lima tahunan.

d. Pendekatan kuantitatif antara kesejahteraan dan keamanan ibarat dua sisi sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika masa mempertahankan kemerdekaan dulu, memang pendekatan keamanan lebih diutamakan. Yang jelas, perlu kita samakan persepsi bahwa kita mempunyai kepentingan nasional yang sama, sehingga tidak ada perbedaan. Kepentingan nasional, baik ditinjau dari ABRI maupun LSM, adalah sama, yaitu: tetap tegaknya negara kesatuan RI dan amannya pembangunan nasional.

e. Tinjauan terhadap masyarakat luas, tentu saja ada perbedaan antara masyarakat kawasan timur Indonesia dan masyarakat kawasan barat Indonesia, yang ditinjau dari kualitas sumber daya manusia, baik disamping persebarannya atau sebagainya .

Lampiran

Daftar Peserta

No.	Nama	Organisasi/Individu
1.	A. Hadi	Lemhannas
2.	Abdul Hakim Nusantara,SH,LLM	Direktur Eksekutif Elsam
3.	Adib	HU Suara Merdeka
4.	A.Bobby Pr	Majalah Hidup
5.	Agus Wahyudi	HU Jawa Pos
6.	Arief	HU Surya
7.	A.Muhaimin	Ketua PP PMII
8.	Mayjen TNI Bambang Yudhoyono	Assosopol Kasospol ABRI
9.	Drs.Bambang Ismawan,MS	Direktur Bina Swadaya
10.	Bambang Widjoyanto,SH	Ketua Dewan Pengurus YLBHI
11.	Bassim Blaszey	First Secretary Australian Embassy
12.	Baihaki	HU Merdeka
13.	Bambang Mubrabto	HU Indonesia Observer
14.	Beta Ramses	HU Media Indonesia
15.	Bonar Tigor Naipospos	Koordinator MIK
16.	Budhiana	HU Pikiran Rakyat
17.	Clamentino Des Amaral	Anggota KomnasHam
18.	De Susanto	Pengurus Bina Swadaya
19.	Daniel	HU Tiras
20.	Eddy Hidayat	HU Media Indonesia
21.	Eko	Fokus Indosiar

22.	Eko T	HU Nusa Tenggara
23.	Eny Purwanto	HU Suara Pembaharuan
24.	Emmy Hafild	Direktur Walhi
25.	Ersa	Pengurus Reti
26.	Eriek	TV. TPI
27.	Freddy Walton	HU Nusa Tenggara
28.	Gustav A.	Direktur Keuangan Pact
29.	Hendardi	Direktur eksekutif PBHI
30.	Harry Bhaskara	HU Jakarta Post
31.	Ichsan Sulistio	Lemhannas
32.	Ida Ayu Indira	RSI World Bank
33.	Iin Indahnessi,SH	Lawyer LBH Jakarta
34.	Imanuddin	HU Jakarta Post
35.	Imran Hasibuan	Majalah D&R
36.	Irohwati	HU Bisnis Indonesia
37.	Jim Waworontu	Grant Manager USAID
38.	Mr.James Seevers	Politic Section USA Embassy
39.	Janus Siagian	Liputan 6 SCTV
40.	Jarot	Pengurus Bina Swadaya
41.	Brigjen JP Manda	Lemhanas
42.	Dr.Kastorius Sinaga	Direktur INPI-Pact
43.	Kawiyan	Liputan 6 SCTV
44.	Keith Loveard	Asiaweek Magazine
45.	Kerdi Mustafa	Sospol ABRI
46.	Kodhyat	Pengurus LSPI
47.	Kus Wahyuni	individu
48.	Lanny	HU Sinar Pagi
49.	Lucra R	individu
50.	Dr.Manuwoto	Bappenas

51.	Mary Zurbuchen	Ford Foundation
52.	Martin Erwan	HU Surabaya Post
53.	Medi	Fokus Indosiar
54.	Mely RS	HU Bisnis Indonesia
55.	M.Fauzi	PMII
56.	Misqola	Radio Ramaco
57.	M.Jumhur Hidayat	Direktur Eksekutif Cides
58.	Mukti	HU Jakarta Post
59.	Nani Saptariani	PMI
60.	Nasrudin	Individu
61.	Novalina	Grant Manager USAID
62.	Novitri	Pengurus Solidaritas Perempuan
63.	Pablo	Lawyer PBHI
64.	Putra Nababan	HU Merdeka
65.	Rachmad Sofian	Hotline Aids RSIJ
66.	Rachmad HC	Majalah D&R
67.	Ratna Susilowati	HU Berita Yudha
68.	Rosmeda	
69.	Rosstien Ilyas	Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara
70.	Rudi	HU Sinar Pagi
71.	TNI (purn) Rudini	Direktur LPSI
72.	Drs.Rustam Ibrahim	Direktur LP3ES
73.	Sri Rusminingtyas	Remdec
74.	Dr.Saraswati	Aids Indonesia
75.	Satya	Liputan 6 SCTV
76.	Semy Havid	Tabloid Mutiara
77.	Soebagyo	Lemhannas

78.	Letkol.Soetomo	Kabag Minu Lemhannas
79.	Syahdan	Majalah Tiras
80.	Syam Batubara	HU Sinar Pagi
81.	Suharna	Lemhannas
82.	Sarwana T	Lemhannas
83.	Sri Wahyuningsih	Yayasan Pelita Ilmu
84.	Sudaryatmo	Pengurus YLKI
85.	Suharna	Lemhannas
86.	Sarwana T	Lemhannas
87.	Suya Tjandra	Lawyer LBH Jakarta
88.	T.Legowo	Peneliti CSIS
89.	Theresia Dwi R	P3M Widuri
90.	Tiarma Siboro	Majalah D&R
91.	Tohap Simanungkalit	Ketua SBSI
92.	Valentino Barus	Yayasan Lestari Budaya
93.	Victor	HU Suara Karya
94.	Yahya Umar	HU Bali Post
95.	Yani Suwarto	Pengurus Bina Desa
96.	Yanti	Yayasan Bina Daya Taruna
97.	Yusac Oppusungga	Grant Manager USAID